KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
SATUAN KERJA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KEGIATAN SWAKELOLA

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2019.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karenanya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terus menggelorakan gerakan Reformasi Birokrasi sebagai suatu keharusan, dan mengupayakan birokrasi pemerintah menjadi lembaga yang efisien, transparan dan akuntabel.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah disusun Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat PPIJJ atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk meningkatkan kinerja unit kerja dimasa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2019
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Reni Ahiantini
NIP. 196910181996032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tugas Dan Fungsi 2

1.3 Struktur Organisasi 3

1.4 Isu Strategis 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA **8**

2.1 Uraian Singkat Renstra 8

2.2 Perjanjian Kinerja 9

2.3 Metode Pengukuran 10

2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra 11

BAB III KAPASITAS ORGANISASI **15**

3.1 Sumber Daya Manusia 8

3.2 Sarana dan Prasarana 9

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 10

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA **20**

4.1 Capaian Kinerja Organisasi 20

4.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Dibandingkan Dengan Rencana Tahun Anggaran 2019 48

4.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 51

4.4 Perbandingan Kinerja Organisasi 54

4.5 Realisasi Anggaran 58

BAB V PENUTUP **60**

5.1 Permasalahan 8

5.2 Langkah Kedepan 9

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2019 ……..	vi
Tabel 2.1	Indikantor Sasaran Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……..	10
Tabel 2.2	Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……	12
Tabel 3.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2019 ……..	15
Tabel 3.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2019 Menurut Golongan ……	15
Tabel 3.3	Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2019 Menurut Pendidikan ……	15
Tabel 3.4	Daftar Sarana dan Parasarana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……	16
Tabel 3.5	Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019 …….	18
Tabel 4.1	Tingkatan Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2019 ……	20
Tabel 4.2	Capaian Sasaran 1 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan …….	22
Tabel 4.3	Indikator kinerja jumlah materi teknis/ dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan ……..	23
Tabel 4.4	Indikator kinerja jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan ……..	25
Tabel 4.5	Indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah I …….	28
Tabel 4.6	Indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II ……	29
Tabel 4.7	Indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III ……..	30
Tabel 4.8	Indikator kinerja Jumlah laporan laporan evaluasi kinerja ……..	31
Tabel 4.9	Capaian Sasaran 2 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan …….	32
Tabel 4.10	Indikator kinerja Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan bantuan teknis …….....	33
Tabel 4.11	Indikator kinerja Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan bantuan teknis …….....	34
Tabel 4.12	Indikator kinerja Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah III yang memperoleh pembinaan bantuan teknis …….....	36
Tabel 4.13	Capaian Sasaran 3 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan …….....	37
Tabel 4.14	Indikator kinerja Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……..	37

Tabel 4.15 Indikator kinerja Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan …….. 39
Tabel 4.16 Indikator kinerja Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan …….. 40
Tabel 4.17 Daftar Proyek KPBU Dit. PPIJJ Tahun 2019 ……. 41
Tabel 4.18 Capaian Sasaran 4 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……. 42
Tabel 4.19 Indikator kinerja Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……..… 43
Tabel 4.20 Capaian Sasaran 5 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……. 45
Tabel 4.21 Indikator kinerja Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……. 45
Tabel 4.22 Capaian Sasaran 6 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……. 48
Tabel 4.23 Sandingan Target dan Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……. 48
Tabel 4.24 Sandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja TA 2019 …..….. 51
Tabel 4.25 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Kinerja Direktorat Tahun 2015-2019 ……. 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan …….……	6
Gambar 2.1	Rencana dan Realisasi Pemabngunan Jalan Tol (km) ……	9
Gambar 4.1	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Materi Teknis Fasilitasi Rencana Penyediaan Perumahan Bagi ASN Melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan …….....	24
Gambar 4.2	Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Implementasi SLF Bagi Rumah MBR	25
Gambar 4.3	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Modul Pemberdayaan Komunitas Swadaya Mikro Perumahan ……..……	26
Gambar 4.4	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Modul Pembinaan Kerjasama dan Investasi Perumahan Melalui BLU ……..…….	27
Gambar 4.5	Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah I …	29
Gambar 4.6	Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah II ..	30
Gambar 4.7	Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah III .	31
Gambar 4.8	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah I …….……	34
Gambar 4.9	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah II …….……	35
Gambar 4.10	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah III …….……..	36
Gambar 4.11	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan …….	38
Gambar 4.12	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Outline Bussiness Case (OBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan …….	40
Gambar 4.13	Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……...	42
Gambar 4.14	Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Proyek Infrstruktur Jalan dan Jembatan …….	44
Gambar 4.15	Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan *Bidding Process* Infrastruktur Jalan dan Jembatan …….....	44
Gambar 4.16	Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ……	47
Gambar 4.17	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan …….	47
Gambar 4.18	Grafik Perbandingan Kinerja Anggaran Direktorat PPIJJ Tahun 2015-2019 ……	54
Gambar 4.19	Grafik Perbandingan Anggaran Dengan Pagu Anggaran Direktorat PPIJJ Tahun 2019 ……	57
Gambar 4.20	Grafik Realisasi Anggaran Direktorat PPIJJ Tahun 2019 ……	58

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Tahun 2019, merupakan tahun pertama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana sebelumnya pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 04 tertera Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan diperjelas kembali pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat PPIJJ menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya, yang setiap tahun indikator kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Kinerja Direktorat PPIJJ untuk tahun 2019 ini berdasarkan 6 (enam) buah sasaran strategis direktorat yaitu:

1. Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan;
2. Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah;
3. Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
4. Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
5. Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan; dan
6. Layanan Perkantoran.

Rencana Strategis Direktorat PPIJJ disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian sasaran strategi dan program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berikut indikator dan pencapaian kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2019:

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan	Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah I	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah laporan evaluasi kinerja	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.	Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah	Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	13 Provinsi	5 Provinsi	38,46%
		Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah II yang	11 Provinsi	5 Provinsi	45,45%

		memperoleh pembinaan dan bantuan teknis			
		Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	10 Provinsi	0 Provinsi	0%
3.	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah penyiapan dukungan kerjasama investasi infrastruktur jalan dan jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	1 Paket Pembiayaan	-	0%
5.	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan	3 Laporan	3 Laporan	100%
6.	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2019 dilakukan dengan cara perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2019 dengan realisasinya. Strategi ke dapan yang dapat diterapkan untuk mengurangi hambatan pencapaian target 2019 yaitu:

1. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*)
2. Melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
4. Memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran serta penyelesaian regulasi yang terkait dengan tusi Direktorat PPIJJ
5. Menyusun SOP untuk memberikan pedoman dan pelaksanaan kinerja

Direktorat PPIJJ Tahun 2019 mengalami 3 (tiga) kali perubahan Pagu DIPA, awal sebesar Rp 35.379.000.000. Revisi Pagu DIPA pertama tanggal 8 Mei 2019 yaitu perubahan nama Satuan Kerja dan mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan untuk *output* baru. Revisi Pagu DIPA kedua tanggal 9 Agustus 2019 menjadi Rp 16.900.000.000. Revisi Pagu DIPA ketiga tanggal 14 November 2019 menjadi Rp 14.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 13.149.226.000. Capaian kinerja Direktorat PPIJJ dapat dilihat dari realisasi penyerapan anggaran tahun 2019. Rencana penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 93,92% berdasarkan *e-monitoring online* Kementerian PUPR.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian PUPR. Laporan kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2019 ini dibuat dengan menyajikan serangkaian keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Direktorat PPIJJ dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi.

Laporan kinerja ada Diretkorat PPIJJ tahun 2019 ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2019. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat PPIJJ untuk meningkatkan kinerjanya.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 14.000.000.000,00.

Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Direktorat PPIJJ Tahun Anggaran 2019 mengalami 3 (tiga) kali perubahan Pagu DIPA, berdasarkan dokumen Pagu DIPA awal, sebesar Rp 35.379.000.000,00 termasuk anggaran Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan. Pagu DIPA direvisi pertama pada tanggal 8 Mei 2019 (Lampiran 1) perubahan terdapat pada nama Satuan Kerja, yang sebelumnya Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan menjadi Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dikarenakan Anggaran Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan dialokasikan untuk pendanaan pelaksanaan output-output baru akan dipenuhi sesuai dengan Surat Nomor R4 06-Dp/161 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perihal Pemanfaatan Alokasi Dana Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 (Lampiran 2) sehingga dilakukan revisi Pagu DIPA kedua dan ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2019 (Lampiran 3) menjadi Rp 16.900.000.000,00. Revisi Pagu DIPA ketiga pada tanggal 4 November 2019 (Lampiran 4) menjadi Rp 14.000.000.000,00 disebabkan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan, lukuidasi Satuan Kerja Dekonsentrasi, dan kebutuhan belanja modal.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

   Direktorat PPIJJ berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Tugas

   Direktorat PPIJJ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

C. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat PPIJJ menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Penyusunan rekomendasi atas proposal kerja sama prakarsa badan usaha;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
7. Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
8. Penyiapan pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
9. Pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
10. Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
11. Pemantauan dan evaluasi target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
12. Pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
13. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
14. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PPIJJ terdiri dari sub direktorat dan sub bagian sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan sistem pembiayaan perumahan, diantaranya :

A. Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi

Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan kerja sama investasi di bidang pembiayaan

infrastruktur jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan analisis dan asessmen pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan evaluasi penyusunan rekomendasi kerja sama prakarsa badan usaha;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrstruktur jalan dan jembatan;
5. Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur jalan dan jembatan;
7. Pengusahan penggunaan dan koordinasi pelaksanaan program penggabugan infrastruktur;
8. Pengusahaan penggunaan dan non-APBN dalam penyapan prastudi kelayakan awal dan akhir; dan
9. Pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

B. Subdirektorat Transaksi

Subdirektorat Transaksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan transaksi di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Transaksi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Penyusunan dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana;
4. Pelaksanan penjajakan minat pasar dan konsultasi publik;
5. Persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana;

6. Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
7. Pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
8. Penyiapan penandatanganan perjanjian.

C. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemanatauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Pemantauan kondisi asset dukungan teknis dibidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Pelaksnaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, manfaat ekonomi, keuntungan badan usaha pelaksana dalam kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
7. Penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
8. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
9. Pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

D. Subbag Tata Usaha

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengakapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan

pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

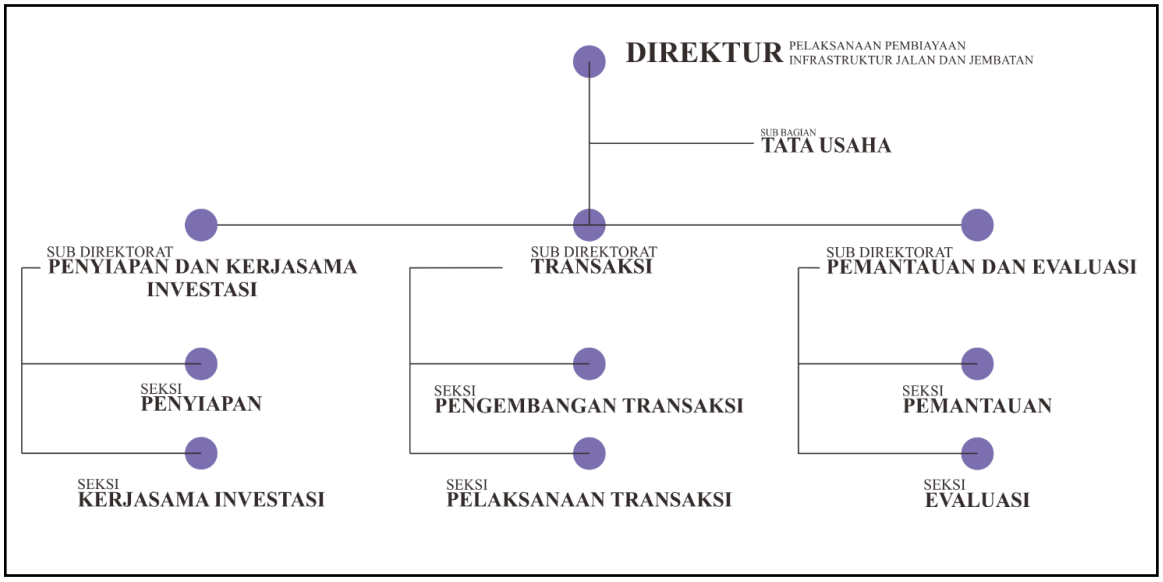

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

1.4 ISU STRATEGIS

Tahun 2019, merupakan tahun pertama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana sebelumnya pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 04 tertera Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan diperjelas kembali pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Dalam rangka menindaklanjuti restrukturisasi organisasi Kementerian PUPR sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, dimana dalam Peraturan Menteri tersebut menyebutkan adanya perpindahan tugas dan fungsi bidang investasi pembinaan infrastruktur dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kementerian PUPR lakukan kegiatan serah terima tugas dan fungsi serta output Bina Investasi Infrastruktur ke Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan di Gedung Utama Kementerian PUPR pada tanggal 5 April 2019.

Penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang ada di Direktorat PPIJJ dari revisi dokumen Renstra hingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) diperlukan. Direktorat PPIJJ tetap malaksanakan kegiatan bidang pembiayaan perumahan yang sebelumnya terdapat pada Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan, antara lain Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan perumahan dan Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis Pada Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Tujuan Direktorat PPIJJ merupakan penjabaran salah satu tujuan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Jumlah proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diusulkan pemerintah sudah cukup banyak, namun hal ini tidak diikuti dengan proses persiapan yang matang khususnya pada tahap *Outline Business Case* (OBC) dan *Financial Business Case* (FBC) yang melibatkan pihak kedua (konsultan). Hal ini menimbulkan hambatan terhadap beberapa proyek dikarenakan *pliminary studi* yang kurang komprehensif dan mendalam. Serta jika tidak disiapkan denganbaik, akan berakibat pada pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan tidak tepat sasaran serta membengkaknya biaya sebagai akibat dari munculnya perubahan atau perbaikan terhadap rencana yang telah diusulkan sejak awal.

Masih terdapat *gap* pendanaan pembangunan sektor infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Menurut Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), proyeksi kebutuhan visium PUPR Tahun 2020-2024 mencapai 2,058 Triliun, APBN hanya mampu menunjang 1,191 Triliun sehingga terdapat *gap* pendanana sebesar 867 Triliun. Sehingga diperlukan inovasi alternative pembiayaan infrastruktur untuk memenuhi gap pendanaan tersebut. Salah satu cara adalah dengan mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Konsep pembiayaan infrastruktur menggunakan skema KPBU merupakan hal baru yang digunakan di Indonesia, karenanya baru beberapa sektor yang berhasil mengimplementasikan konsep tersebut. Dalam bidang infrastruktur keberhasilan baru terlihat di sektor jalan dan sumber daya air.

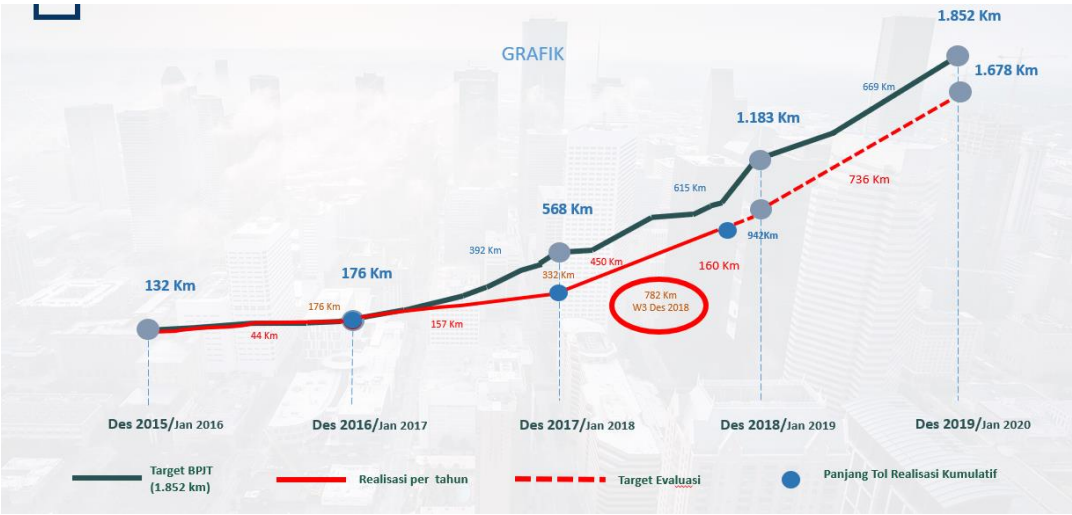

Gambar 2.1 Rencana dan Realisasi Jalan Tol (km)

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Direktorat PPIJJ menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Selama Tahun 2019, Direktorat PPIJJ memiliki perubahan Perjanjian Kinerja sebanyak dua kali yaitu pada Februari 2019 dan November 2019 (Lampiran 5 & 6) dari yang awalnya PK Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan.

Direktorat PPIJJ sebagai salah satu unit kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2019 memiliki program Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Output dari program ini adalah :

1. Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan;
2. Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah;
3. Penyiapan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan;

4. Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
5. Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
6. Layanan perkantoran.

2.3 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Metode pengukuran kinerja Direktorat PPIJJ adalah Metode Analisa Data Kuantitatif, yaitu dengan membandingkan hasil pencapaian output akhir kegiatan berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat PPIJJ. Berikut tabel satuan indikator sasaran Direktorat PPIJJ adalah:

Tabel 2.1 Indikantor Sasaran Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019
1.	Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan	Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah I	Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah laporan evaluasi kinerja	Dokumen	2 Dokumen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019
2.	Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah	Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	Provinsi	13 Provinsi
		Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	Provinsi	11 Provinsi
		Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	Provinsi	10 Provinsi
3.	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan	Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah penyiapan dukungan kerjasama investasi infrastruktur jalan dan jembatan	Dokumen	1 Dokumen
4.	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	Paket Pembiayaan	1 Paket Pembiayaan
5.	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan	Laporan	3 Laporan
6.	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	1 Bulan Layanan

Selain indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Rencana Kerja (Renja) di atas, Direktorat PPIJJ diamanatkan untuk memperhatikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam melaksanakan output kegiatan Tahun Anggaran 2019, yaitu dengan memberikan himbauan pada Surat Undangan acara terkait dengan Pengarusutamaan Gender dimana peserta perempuan yang hadir dalam acara minimal 30% dari total peserta.

2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Target kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2019 menurut Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN					
					2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN																
SASARAN KEGIATAN																
A.	Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan										11,05	12,88	15,23	18,28	3,600	37,432
	1.	Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Materi Teknis/ Dokumen	Jawa Barat, Sumatera Selatan, Gorontalo, DKI Jakarta	2	2	2	2	2	10						
	2.	Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Dokumen	Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta	3	2	2	2	2	10						
	3.	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah I	Dokumen	Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Jambi, Babel, Kepri, Lampung, Riau, Jabar, DKI Jakarta, Banten	13	13	13	13	13	13						
	4.	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	Dokumen	Jateng, Jatim, Yogyakarta, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Bali, NTB, NTT	11	11	11	11	11	11						
	5.	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	Dokumen	Sulbar, Sulsel, Sulut, Sultra, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat	10	10	10	10	10	10						
	6.	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Dokumen	DKI Jakarta	2	2	2	2	2	10						
B.	Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah										4,400	5,060	6,633	7,960	2,100	25,152
	1.	Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/Kota	Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Jambi, Babel, Kepri, Lampung, Riau, Jabar, DKI Jakarta, Banten	10 LKB/LKBB 13 Provinsi dan 98 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 13 Provinsi dan 98 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 13 Provinsi dan 195 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 13 Provinsi dan 195 Kab/Kota, 7 Kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan mikro	10 LKB/LKBB 13 Provinsi dan 195 Kab/Kota, 6 Kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan mikro	10 LKB/LKBB 13 Provinsi dan 195 Kab/Kota, 13 Kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan mikro						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN					
					2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.	Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/Kab/Kota	Jateng, Jatim, Yogyakarta, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Bali, NTB, NTT	10 LKB/LKBB 11 Provinsi dan 88 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 11 Provinsi dan 88 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 11 Provinsi dan 175 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 11 Provinsi dan 175 Kab/Kota, 6 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro	10 LKB/LKBB 11 Provinsi dan 175 Kab/Kota,5 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro	10 LKB/LKBB 11 Provinsi dan 175 Kab/Kota, 11 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro						
	3.	Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/Kab/Kota	Sulbar, Sulsel, Sulut, Sultra, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat	6 LKB/LKBB 10 Provinsi dan 72 Kab/Kota	6 LKB/LKBB 10 Provinsi dan 72 Kab/Kota	6 LKB/LKBB 10 Provinsi dan 144 Kab/Kota	6 LKB/LKBB 10 Provinsi dan 144 Kab/Kota, 5 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro	6 LKB/LKBB 10 Provinsi dan 144 Kab/Kota, 5 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro	6 LKB/LKBB 10 Provinsi dan 144 Kab/Kota, 10 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro						
C.	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan										-	-	-	-	4,250	4,250
	1.	Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1						
	2.	Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1						
	3.	Jumlah penyiapan dukungan kerjasama investasi infrastruktur jalan dan jembatan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1						
D.	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan										-	-	-	-	1,300	1,300
	1.	Jumlah paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1						
E.	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan										-	-	-	-	1,650	1,650
	1.	Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan	Dokumen	-	-	-	-	-	3	3						
F.	Layanan Perkantoran										-	-	-	-	1,100	1,100

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN					
					2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.	Jumlah layanan perkantoran	Dokumen	-	-	-	-	-	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan						

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat PPIJJ, oleh orang 44 pegawai yang terdiri pegawai 19 laki-laki dan 24 perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2019

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	15
2.	CPNS	5
3.	Honorer	8
4.	KI	16
Total		43

Tabel 3.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2019 Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Gol I	4
2.	Gol II	36
3.	Gol III	2
4.	Gol IV	1
Total		43

Tabel 3.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2019 Menurut Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	12
2.	Strata 1 (S1)	29
3.	SMA	2
4.	SD	1
Total		43

3.2 SARANA DAN PRASARAN

Direktorat PPIJJ dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja baik berupa barang fisik maupun non fisik (*software*). Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan sesuai fungsinya. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut terdapat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar Sarana dan Parasarana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
KODE UAKPB : 033.08.01.400812.000

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	
1.	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	buah
2.	3050104005	Filing Cabinet Besi	4	buah
3.	3050105015	Alat Penghancur Kertas	4	buah
4.	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	buah
5.	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	buah
6.	3050201002	Meja Kerja Kayu	29	buah
7.	3050201008	Meja Rapat	1	buah
8.	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	23	buah
9.	3050206002	Televisi	1	buah
10.	3100102001	P.C Unit	22	buah
11.	3100102003	Note Book	1	buah
12.	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	buah
13.	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	buah

Sumber UPB : SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Untuk mewujudkan kegiatan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2019, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 14.000.000.000,00. Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Direktorat PPIJJ Tahun Anggaran 2019 mengalami 3 (tiga) kali perubahan Pagu DIPA, dimana berdasarkan dokumen Pagu DIPA awal, anggaran yang diberikan adalah sejumlah Rp 35.379.000.000,00 termasuk anggaran Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan. Pagu DIPA direvisi pertama pada tanggal 8 Mei 2019 (Lampiran 1) perubahan terdapat pada nama Satuan Kerja, yang sebelumnya Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan menjadi Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dikarenakan Anggaran Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan dialokasikan untuk pendanaan pelaksanaan output-output baru akan dipenuhi sesuai dengan Surat Nomor R4 06-Dp/161 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perihal Pemanfaatan Alokasi Dana Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 (Lampiran 2) sehingga dilakukan revisi Pagu DIPA kedua dan ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2019 (Lampiran 3)

menjadi Rp 16.900.000.000,00. Revisi Pagu DIPA ketiga pada tanggal 4 November 2019 (Lampiran 4) menjadi Rp 14.000.000.000,00 disebabkan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan, lukuidasi Satuan Kerja Dekonsentrasi, dan kebutuhan belanja modal.

Adapun rincian DIPA Direktorat PPIJJ Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KOMPONEN	USULAN NAMA PAKET BARU	JUMLAH PAKET	K/S	ANGGARAN
Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan (Eksisting)					22	3K/19S	14.000.000.000
	Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan (Eksisting)				9	9S	3.600.000.000
		1. Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Penyusunan Rencana Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Materi Teknis Fasilitiasi Rencana Penyediaan Perumahan bagi ASN mellaui Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	S	526.000.000
				Identifikasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka Implementasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bagi Rumah Masyrakat Berpenghasilan Rendah	1	S	550.000.000
				SUB TOTAL	2	S	1.076.000.000
		2. Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Penyusunan Pedoman Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	Prnyusunan Mosul Pemberdayaan Komunitas Pembiayaan Sawadaya Mikro Perumahan	1	S	515.000.000
				Penyusunan Modul Pembinaan Kerjasama dan Investasi Peerumahan melalui Badan Layanan Umum Daerah	1	S	550.000.000
				SUB TOTAL	2	S	1.065.000.000
		3. Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPKPembiayaan Perumahan di Wilayah I	Diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah I	Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayan Infarstruktur di Wilayah I	1	S	459.000.00
				SUB TOTAL	1	S	459.000.00
		4. Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPKPembiayaan Perumahan di Wilayah II	Diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayan Infarstruktur di Wilayah II	1	S	450.000.000
				SUB TOTAL	1	S	450.000.000
		5. Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPKPembiayaan Perumahan di Wilayah III	Diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayan Infarstruktur di Wilayah III	1	S	250.000.000
				SUB TOTAL	1	S	250.000.000
		6. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Penyusunan laporan kinerja	Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	1	S	150.000.000
				Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat	1	S	150.000.000
				SUB TOTAL	2	S	300.000.000
	Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah (Eksisting)				3	S	2.100.000.000
		7. Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, peemrintah daerah di Wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	Pembinaan dan Bantuan Teknis kepada lembaga Jasa Keuangan (LK/LKBB) di Wilayah I	Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah I	1	S	494.000.000
				SUB TOTAL	1	S	
		8. Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, peemrintah daerah di Wilayah II yang	Pembinaan dan Bantuan Teknis kepada lembaga Jasa Keuangan (LK/LKBB) di Wilayah II	Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah II	1	S	928.300.000
				SUB TOTAL	1	S	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KOMPONEN	USULAN NAMA PAKET BARU	JUMLAH PAKET	K/S	ANGGARAN
		memperoleh pembinaan dan bantuan teknis					
		9. Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, peemrintah daerah di Wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	Pembinaan dan Bantuan Teknis kepada lembaga Jasa Keuangan (LK/LKBB) di Wilayah III	Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah III	1	S	677.700.000
				SUB TOTAL	1	S	
Sub Direktorat Penyiapan Kerjasama	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan				3	1K/2S	4.250.000.000
		Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan	1	S	1.500.000.000
				SUB TOTAL	1		1.500.000.000
		Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan	Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Dokumen *Outline Business Case* (OBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	S	2.000.000.000
				SUB TOTAL	1		2.000.000.000
		Jumlah penyiapan dukungan kerjasama investasi infrastruktur jalan dan jembatan	Penyiapan Dukungan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Fasilitasi Penyiapan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	S	750.000.000
				SUB TOTAL	1	S	750.000.000
Sub Direktorat Transaksi	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan				3	1K/2S	1.300.000.000
		Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Fasilitasi Penyiapan Dokumen Pengadaan Badan saha Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	S	600.000.000
				SUB TOTAL	1	S	600.000.000
			Pelaksanaan Transaksi dan Pendanpingan Pembiayaan Infarstruktur Jalan dan Jembatan	Fasilitasi Pelaksanaan Bidding Process Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	S	700.000.000
				SUB TOTAL	1	S	700.000.000
Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Evaluasi Inveasti Infrastruktur Jalan dan Jembatan					1K/3S	1.650.000.000
		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Inveasti Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Pemantauan Tahapan Perencanaan, Penyiapan, dan Transaksi Pelaksanaan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan	1	S	800.000.000
				SUB TOTAL	1	S	800.000.000
			Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Evaluasi Tahapan Perencanaan, Penyiapan, dan Transaksi Pelaksanaan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan	1	S	700.000.000
				SUB TOTAL	1	S	700.000.000
			Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1		150.000.000
				SUB TOTAL	1	S	150.000.000
Sub Bagian Tata Usaha	Layanan Perkantoran				1	Layanan	1.100.000.000
		Jumlah Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasioanl dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1.100.000.000
				SUB TOTAL	1	Layanan	1.100.000.000

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2019

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2019 yang dilakukan dengan cara/ membandingkan antara target pencapaian Direktorat PPIJJ dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktur PPIJJ dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019. Pencapaian kinerja tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi umpan balik guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Berikut ini adalah sasaran kegiatan Direktorat PPIJJ tahun 2019 yang terdapat pada Perjanjian Kinerja antara Direktur PPIJJ dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, diantaranya:

1. Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan;
2. Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
3. Layanan perkantoran.

Berikut ini akan diuraikan sasaran kinerja / *output* dari Direktorat PPIJJ berdasarkan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tabel tingkatan capaian kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2019.

Tabel 4.1 Tingkatan Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2015-2019	Realisasi	Capaian
1.	Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan	Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan	1 Laporan	1 Laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2015-2019	Realisasi	Capaian
		Perumahan di Wilayah I			
		Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.	Layanan Pembinana dan Bantuan Teknis Pada Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, peemrintah daerah di Wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	13 Provinsi	5 Provinsi	38,46%
		Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, peemrintah daerah di Wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	11 Provinsi	5 Provinsi	45,45%
		Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, peemrintah daerah di Wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	10 Provinsi	0 Provinsi	0%
3.	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah penyiapan dukungan kerjasama investasi infrastruktur jalan dan jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2015-2019	Realisasi	Capaian
4.	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Paket Pembiayaan	-	0%
5.	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Inveasti Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3 Laporan	3 Laporan	100%
6.	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%

B. Sasaran 1 : Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Direktorat PPIJJ menetapkan 6 (enam) indikator kinerja beserta paket kegiatan masing-masing indikator yaitu:

Tabel 4.2 Capaian Sasaran 1 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Penyusunan Materi Teknis Failitasi Rencana Penyediaan Perumahan bagi ASN melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Identifikasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka Implementasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bagi Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.	Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Penyusunan Modul Pemberdayaan Komunitas Swadaya Mikro Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusuna Modul Pembinaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
		Kerjasama dan Investasi Perumahan melalui Badan Layanan Umum Daerah			
3.	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di wilayah I	Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah I	1 Laporan	1 Laporan	100
4.	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di wilayah II	Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah II	1 Laporan	1 Laporan	100
5.	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di wilayah III	Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah III	1 Laporan	1 Laporan	100
6.	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Penyusunan laporan Evaluasi Pelaksnaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100
		Penyusunan Laporan Kinerja Direkorat	1 Laporan	1 Laporan	100

1. Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan

Tabel 4.3 Indikator kinerja jumlah materi teknis/ dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan

Indikator Kinerja		
Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan		
Target	**Realisasi**	**%**
2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah Materi Teknis/Dokumen

Rencana Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

a. **Penyusunan Modul Penyediaan Perumahan bagi ASN melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan**

   Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk membahas penyusunan modul penyediaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya untuk mengurangi angka backlog, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara yang sudah terdaftar pada aplikasi RUMI. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Permata Bogor, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019. Materi yang dijadikan bahan diskusi adalah Program Bantuan Pembiayaan Perumahan, Sharing Kebutuhan Rumah bagi ASN Provinsi Jawa Barat, Penyiapan Skema Pembiayaan Perumahan ASN, Pendataan Kebutuhan Rumah ASN. Hasil yang diharapakan dari kegiatan ini adalah Materi Teknis Fasilitasi Rencanan Penyediaan Perumahan bgai ASN melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Gambar 4.1 Kegiatan FGD Penyusunan Modul Fasilitasi Penyediaan Perumahan Bagi ASN Melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan

b. **Idektifikasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Implementasi Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bagi Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**

   Tujuan dari kegiatan kunjungan lapangan adalah mengidentifikasi pelaksanaan bantuan program perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Gorontalo, mengidentifikasi terkait pemahaman Pemerintah Kota

tentang tata cara penerbitan SLF untuk rumah sederhana, mengidentifikasi penerapan SLF baik untuk rumah sederhana maupun bangunan lainnya yang kompleks, dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penerbitan SLF.

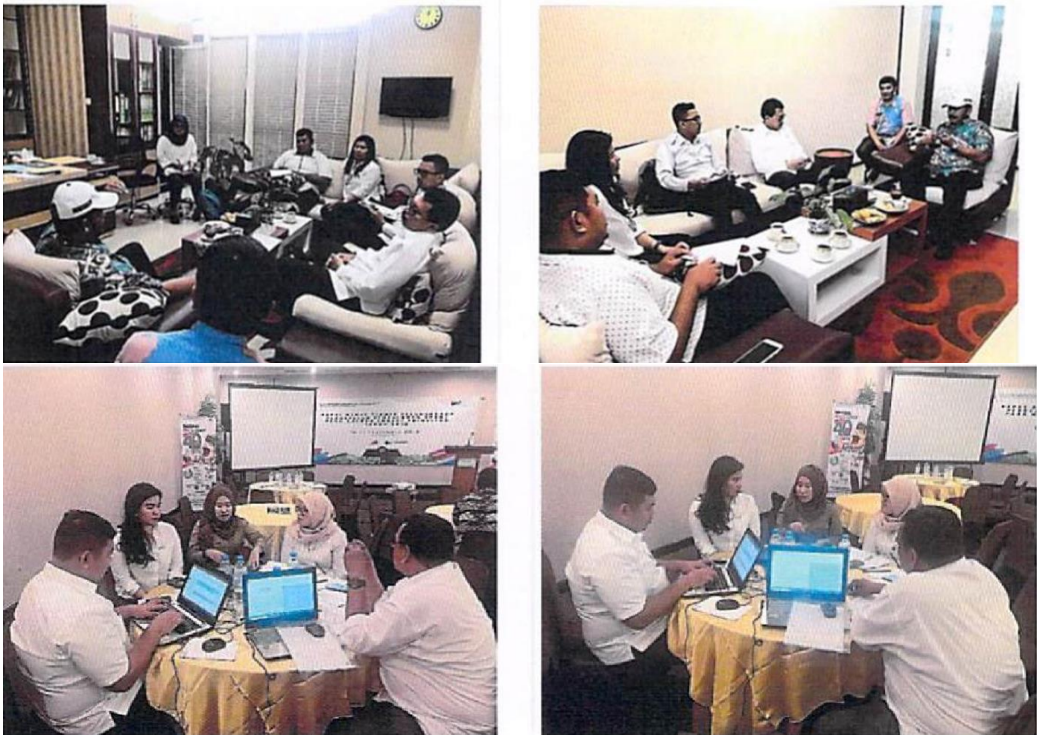

Gambar 4.2 Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

2. Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan

Tabel 4.4 Indikator kinerja jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan

Indikator Kinerja		
Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan		
Target	**Realisasi**	**%**
2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Modul Pemberdayaan Komunitas Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP)

Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan memungkinkan masyarakat berpenghasilan tidak tetap untuk mendapatkan pinjaman yang cukup rendah dengan jangka waktu peminjaman cukup pendek. Hal tersebut dapat mengurangi risiko kredit yang dihadapi lembaga jasa keuangan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Pinjaman dalam skema PSMP bersifat inkremental dan berulang dalam memenuhi kebutuhan rumah secara bertahap. Dalam skema PSMP jika pinjaman dapat dikembalikan, debitur dapat menerima pinjaman pada periode selanjutnya dengan nilai pinjaman yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih panjang. Penerapan skema PSMP ini memerlukan peran komunitas, khususnya dari sisi permintaan penyediaan perumahan. Komunitas yang ada diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahannya melalui Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhan perumahannya melalui pembiayaan mikro. Hasil dari kegiatan ini adalah Modul Pemberdayaan Komunitas Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP).

Gambar 4.3 FGD Penyusunan Modul Pemberdayaan Komunitas Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP)

b. Penyusunan Modul Pembinaan Kerjasama dan Investasi Perumahan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 346, dapat dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat dikembangkan untuk mengakselerasi Program Pembiayaan Perumahan di daerah. Penerapan Badan Layanan Umum di daerah dapat menjadi instrumen dalam pengelolaan anggaran yang fleksibel demi kepentingan masyarakat luas. APBN/APBD yang dikelola BLU/BLUD dapat melewati tahun fiskal berjalan sehingga lebih fleksibel dalam perencanaannya. Selain itu, BLU/BLUD dapat menerima pendapatan operasional dari layanan yang diberikan dan dapat dimanfaatkan kembali tanpa perlu disetor ke kas Negara/Daerah terlebih dahulu. Peran lain yang diharapkan dapat dijalankan oleh BLUD antara lain adalah melakukan kegiatan kerjasama investasi, pengelolaan dana bergulir, dan pembiayaan perumahan lainnya. Hasil yang diharapakan dari kegiatan ini adalah Modul Pembinaan Kerjasama dan Investasi Perumahan melalui Badan Layanan Umum Daerah.

Gambar 4.4 FGD Penyusunan Modul Pembinaan Kerjasama dan Investasi Perumahan Melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

3. Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah I

Tabel 4.5 Indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah I

Indikator Kinerja		
Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di wilayah I		
Target	**Realisasi**	**%**
1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di wilayah I adalah sebagai berikut:

a. **Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah I**

Dalam menyelenggarakan program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kementerian PUPR memerlukan banyak dukungan dari stakeholder pembiayaan perumahan, terutama dukungan Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan. Oleh karena itu kegiatan diseminasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pembiayaan perumahan perlu dilaksanakan untuk menyebarluaskan kebijakan pembiayaan perumahan kepada stakeholder di daerah dengan harapan dapat meningkatkan akses MBR dalam memperoleh rumah melalui program penyelenggaraan perumahan di daerah.

Adapun lingkup Pelaksanaan Diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah I adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah I.

Dalam pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2019, Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan yang kemudian menjadi Direktorat PPIJJ telah melaksanakan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palembang pada tanggal 30 Januari 2019 di Kota Palembang, dengan peserta kegiatan adalah perwakilan Pemerintah Daerah (Dinas yang mengurusi bidang perumahan) di wilayah I, LKB/ LKBB dan Asosiasi Pengembang yang berada di wilayah I.

Gambar 4.5 Kegiatan NSPK Wilayah I

4. Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II

Tabel 4.6 Indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II

Indikator Kinerja		
Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di wilayah II		
Target	**Realisasi**	**%**
1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kapasitas Pemnda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah II

Lingkup wilayah pelaksanaan kegiatan diseminasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pembiayaan perumahan di

wilayah II adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II.

Dalam pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2019, Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan yang kemudian menjadi Direktorat PPIJJ telah melaksanakan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Semarang pada tanggal 7 Februari 2019 di Kota Semarang, dengan peserta kegiatan adalah perwakilan Pemerintah Daerah (Dinas yang mengurusi bidang perumahan) di wilayah II, LKB/ LKBB dan Asosiasi Pengembang yang berada di wilayah II.

Gambar 4.6 Kegiatan NSPK Wilayah II

5. Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III

Tabel 4.7 Indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III

Indikator Kinerja		
Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III		
Target	**Realisasi**	**%**
1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah laporan pelaksanaan

diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III adalah sebagai berikut:

a. **Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah III**

   Lingkup wilayah pelaksanaan kegiatan diseminasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pembiayaan perumahan di wilayah III adalah Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III. Manfaat dari pelaksanaan kegitaan ini adalah meningkatnya pemahaman pemerintah daerah, *stakeholder*, dan instansi terkait tentang penyelenggaraan

Gambar 4.7 Kegiatan NSPK Wilayah III

6. Jumlah laporan evaluasi kinerja

Tabel 4.8 Indikator kinerja Jumlah laporan laporan evaluasi kinerja

Indikator Kinerja
Jumlah laporan laporan evaluasi kinerja

Target	Realisasi	%
2 Laporan	2 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah laporan evaluasi kinerja adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan

Dari kegiatan Pembiayaan Perumahan dan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan ini diharapkan bisa memberikan output yang dapat berguna bagi banyak pihak terutama para stakeholder pembiayaan perumahan. Output yang direncanakan dari kegiatan ini adalah 1 (satu) buah dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan yang berisikan rangkuman pelaksanaan kegitaan yang untuk mencapai target terkait pembinaan sistem pembiayaan perumahan.

b. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat

Dari kegiatan ini diharapkan bisa memberikan output yang dapat berguna bagi banyak pihak terutama para stakeholder pembiayaan perumahan. Output yang direncanakan dari kegiatan ini adalah 1 (satu) buah dokumen Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ dengan sasaran Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan.

C. Sasaran 2 : Layanan Pembinana dan Bantuan Teknis Pada Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis 2, Direktorat PPIJJ menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja beserta paket kegiatan masing-masing indikator yaitu:

Tabel 4.9 Capaian Sasaran 2 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi,	Pembinaan Pembiayaan	13 Provinsi	5 Provinsi	100%

	pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan bantuan teknis	Infrastruktur di wilayah I			
2.	Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan bantuan teknis	Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di wilayah II	10 Provinsi	5 Provinsi	100%
3.	Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah III yang memperoleh pembinaan bantuan teknis	Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di wilayah III	11 Provinsi	-	0%

1. Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah I yang memperoleh pembinaan bantuan teknis

Tabel 4.10 Indikator kinerja Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan bantuan teknis

Indikator Kinerja		
Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah I yang memperoleh pembinaan bantuan teknis		
Target	**Realisasi**	**%**
13 Provinsi	5 Provinsi	38,46%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah I adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah I

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan kelembagaan terkait, serat menggali potensi daerah untuk penerapan KPBU bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan di wilayah I. Dalam pelaksanaan paket kegiatan ini, telah dilaksanaan kegiatan pembinaan guna melakukan koordinasi lintas unit organisasi di Kementerian PUPR dan instansi eksternal terkait pelaksanaan KPBU sebagai model pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan penyampaian perubahan organisasi kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan di Kota Palembang dengan melibatkan 5 provinsi antara lain Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung pada tanggal 12 April 2019.

Gambar 4.8 Kegiatan NSPK Wilayah III

2. Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah II yang memperoleh pembinaan bantuan teknis

Tabel 4.11 Indikator kinerja Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan bantuan teknis

Indikator Kinerja		
Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan bantuan teknis		
Target	**Realisasi**	**%**
11 Provinsi	5 Provinsi	45,45%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah II

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan kelembagaan terkait, serat menggali potensi daerah untuk penerapan KPBU bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan di wilayah II. Dalam pelaksanaan paket kegiatan ini, telah dilaksanaan kegiatan pembinaan guna melakukan koordinasi lintas unit organisasi di Kementerian PUPR dan instansi eksternal terkait pelaksanaan KPBU sebagai model pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan penyampaian perubahan organisasi kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan di Kota Denpasar dengan melibatkan 3 provinsi antara lain Provinsi NTB, Provinsi NTT, dan Provinsi Bali pada tanggal 8 April 2019 dan pelaksanaan di Kota Yogyakarta dengan melibatkan 2 provinsi antara lain Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 April 2019.

Gambar 4.9 Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah II

3. Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah III yang memperoleh pembinaan bantuan teknis

Tabel 4.12 Indikator kinerja Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah III yang memperoleh pembinaan bantuan teknis

Indikator Kinerja		
Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah III yang memperoleh pembinaan bantuan teknis		
Target	**Realisasi**	**%**
10 Provinsi	-	0%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah III adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah III

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan kelembagaan terkait, serat menggali potensi daerah untuk penerapan KPBU bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan di wilayah III.

Kegiatan pembinaan pembiayaan infrastruktur di wilayah III tidak terlaksanan karena berdasarkan arahan Menteri PUPR kegiatan ini tidak perlu dilanjutkan. Namun untuk menyelesaikan paket kegiatan ini maka disusun Buku Pelaksanaan Kegiataan Pembiayaan Perumahan untuk 34 Provinsi sebagai *output* kegiatan.

Gambar 4.10 Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah III

D. Sasaran 3 : Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Untuk mencapai sasaran strategis 3, Direktorat PPIJJ menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja beserta paket kegiatan masing-masing indikator yaitu:

Tabel 4.13 Capaian Sasaran 3 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

1. Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tabel 4.14 Indikator kinerja Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja		
Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		
Target	**Realisasi**	**%**
1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan

Tujuan Kegiatan Swakelola Penyusunan Studi Pendahuluan Dit. PPIJJ TA 2019 Sebagai tahapan awal untuk pengajuan Dokumen Permohonan PDF (DPP) kepada Kementerian Keuangan, sehingga ruang lingkup dari penyusunan Studi Pendahuluan kegiatan swakelola Dit. PPIJJ TA 2019 disusun lebih detail sesuai dengan ruang lingkup Kajian Awal Studi Kelayakan. Proyek KPBU yang sedang berprogres dalam penyusunan studi pendahuluan adalah pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Wamena-Jayapura (Yetti-Memberamo-Elim) dan Penggantian dan/atau duplikasi jembatan *Callendar Hamilton* di Pulau Jawa.

Gambar 4.11 Kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan

2. Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tabel 4.15 Indikator kinerja Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja		
Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan		
Target	**Realisasi**	**%**
1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen *Outline Business Case* (OBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan penyiapan kajian awal prastudi kelayakan awal (*outline business case*), terdiri dari: kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur, kajian risiko, kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dankajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. *Outline Business Case* disiapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/DireksiBUMN/Direksi BUMD selaku PJPK dalam tahap penyiapan.

Penyusunan Dokumen *Outline Busniness Case* (OBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan, dengan lokus proyek Jalan Tol Mamminasata.

Gambar 4.12 Kegiatan Penyusunan Dokumen OBC Proyek KPBU Sektot Jalan dan Jembatan

3. Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tabel 4.16 Indikator kinerja Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja		
Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan		
Target	**Realisasi**	**%**
1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi permohonan proyek KPBU jalan tol *unsolicitied* (yang diprakarsai oleh badan usaha), dengan melibatkan DJBM dan BPJT agar proyek usulan prakarsa jalan tol yang layak secara teknis, ekonomi dan finansial, serta kemampuan keuangan dari badan usaha dapat

memperoleh izin prakarsa. Selama Tahun Anggaran 2019, DJPI telah memfasilitasi pembahasan progres untuk 19 proyek jalan tol unsolicitied yang terbagi atas tiga tahap: persiapan kelengkapan dokumen oleh pemrakarsa, persetujuan studi kelayakan, dan persetujuan prakarsa.

Tabel 4.17 Daftar Proyek KPBU Dit. PPIJJ Tahun 2019

Persiapan Dokumen	Persetujuan Studi	Persetujuan Prakarsa
1. Jalan Tol Mojokerto - Mojosari - Gempol; 2. Jalan Tol Layang Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) Ruas Pasteur - Soekarno Hatta; 3. Jalan Tol Cileles - Maja - Rangkasbitung - Merak (CEMARA); 4. Jalan Tol Pasar Jumat - Parung; 5. Jalan Tol Probolinggo - Lumajang; 6. Jalan Tol Cikarang - Ciranjang; 7. Jalan Tol Cipularang - Lembang; 8. Jembatan Batam - Bintan; 9. Jalan Tol Lingkar Selatan Bandung; 10. Jalan Tol Pulogebang - JORR II.	1. Jalan Tol Tomang - Pluit - Bandara Soekarno Hatta; 2. Jalan Tol Dalam Kota Medan; 3. Jalan Tol Semarang Harbour; 4. Jalan Tol Malang - Kepanjen.	1. Jalan Tol Bogor - Serpong via Parung; 2. Jalan Tol Cikunir - Karawaci; 3. Multi Lane Free Flow (MLFF) 4. Jalan Tol JORR Elevated Ruas Cikunir - Ulujami; 5. Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat (sedang dalam proses)

Gambar 4.13 Kegiatan Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

E. Sasaran 4 : Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Untuk mencapai sasaran strategis 3, Direktorat PPIJJ menetapkan 2 (dua) indikator kinerja beserta paket kegiatan masing-masing indikator yaitu:

Tabel 4.18 Capaian Sasaran 4 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Fasilitasi Penyiapan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Fasilitasi Pelaksanaan *Bidding Process* Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

1. Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tabel 4.19 Indikator kinerja Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja		
Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		
Target	**Realisasi**	**%**
1 Paket Pembiayaan	-	0%

Berdasarkan tabel diatas, Paket Kegiatan yang dimaskud dalam target indikator ini adalah berupa proyek yang sudah mencapai tahapan *financial close* (FC) sesuai dengan tahapan yang ada KPBU. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi Penyiapan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan mempersiapkan pelaksanaan tahapan transaksi dalam KPBU. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah minat Badan Usaha terhadap proyek-proyek KPBU pada sektor jalan dan jembatan dalam bentuk *Letter of Interest*. Kegiatan yang mendukung untuk pelaksanaan paket kegiatan ini adalah *market sounding* yang merupakan salah satu tahapan pelaksanaan proyek KPBU sebagai bentuk penawaran proyek KPBU kepada investor. Proyek Dit. PPIJJ yang disertakan dalam kegiatan *market sounding* Jalan Tol Mamminasata, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA, dan Jalan Tol Yoyakarta-Bawen.

Gambar 4.14 Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Badan Usaha Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan

b. Fasilitasi Pelaksanaan *Bidding Process* Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tujuan diselenggarakannya kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan *Bidding Process* Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah dalam rangka Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terkait di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. *Output* dari kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan *Bidding Process* Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan dan memahami tahapan transaksi dan siap melaksanakan proses pelelangan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan paket kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan *capacity building* sebagai bentuk mempelajari tahapan pelaksanaan lelang untuk proyek KPBU.

Gambar 4.15 Kegiatan Pelaksanaan *Bidding Process* Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan

F. Sasaran 5 : Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Untuk mencapai sasaran strategis 3, Direktorat PPIJJ menetapkan 2 (dua) indikator kinerja beserta paket kegiatan masing-masing indikator yaitu:

Tabel 4.20 Capaian Sasaran 5 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Laporan	1 Laporan	100%

1. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tabel 4.21 Indikator kinerja Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja		
Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan		
Target	**Realisasi**	**%**
3 Laporan	3 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

a. Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah Bahan pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, Hasil pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerjasama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, dan Mendapatkan hasil pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kunjungan lapangan ke Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Paspro dan Probowangi, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol Solo-NYIA-Kulonprogo, Jalan Tol Semarang *Harbour*, Jalan Tol Mamminasata, Jalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai dalam rangka Peneraoan MLFF, dan Jalan Lintas Timur Sumatera Prov. Riau.

Sebagai upayah melengkapu pelaksanaan tusi Dit. PPIJJ disusunlah SOP untuk setiap tahapan yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan P erumahan.

Gambar 4.16 Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

b. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Skema KPBU dalam pembiayaan infrastruktur khususnya di sektor Jalan dan Jembatan saat ini telah banyak diterapkan dalam pengusahaan infrastruktur di Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan penilaian pemenuhan pelaksanaan skema KPBU pada sektor Jalan dan Jembatan. Lingkup kegiatan dari paket kegiatan ini adalah pelaksanaan skema KPBU yang dilakukan untuk sektor jalan dan Jembatan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk pelaksanaan paket kegiatan ini antara lain rapat tindak lanjut pembahasan pengusahaan Jalan Tol Paspro dan Probowangi, rapat finalisasi lembar kerja instrument pemantauan dan evaluasi, rapat Pembahasan Usulan Alternatif Pembiayaan pada Dukungan Konstruksi Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, FGD Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan Tahun 2015-2019, dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan Tahun 2015-2019.

Gambar 4.17 Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

c. Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dari kegiatan ini diharapkan bisa memberikan output yang dapat berguna bagi banyak pihak terutama para *stakeholder* pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Output yang direncanakan dari kegiatan ini adalah 2 (dua) buah dokumen Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ dan Laporan Evaluasi Direktorat PPIJJ.

G. Sasaran 6 : Layanan Perkantoran

Untuk mencapai sasaran strategis 6, Direktorat PPIJJ menetapkan 1 (satu) indikator kinerja beserta paket kegiatan masing-masing indikator yaitu:

Tabel 4.22 Capaian Sasaran 6 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah layanan perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%

4.2 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN RENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

Tabel 4.23 Sandingan Target dan Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
(Status: 6 Januari 2020)

NO	OUTPUT/IKK/PAKET KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
Pagu Anggaran Direktorat PPIJJ		14.000.000.000	13.149.226.000	93,92	100
A	Output: Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan	3.600.000.000	3.393.675.000	94,27	100

NO	OUTPUT/IKK/PAKET KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	1.076.000.000	1.043.173.000	96,98	100
a	Penyusunan Materi Teknis Fasilitasi Rencana Penyediaan Perumahan bagi ASN melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan	526.000.000	517.598.000	98,40	100
b	Identifikasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka Implementasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bagi Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	550.000.000	525.575.000	95,56	100
2	Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan	1.065.000.000	1.025.115.000	96,17	100
a	Penyusunan Modul Pemberdayaan Komunitas Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan	515.000.000	482.260.000	93,64	100
b	Penyusunan Modul Pembinaan Kerjasama dan Investasi Perumahan melalui Badan Layanan Umum Daerah	550.000.000	542.855.000	98,70	100
3	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di wilayah I	459.000.000	443.040.000	96,52	100
a	Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah I	459.000.000	443.040.000	96,52	100
4	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di wilayah II	450.000.000	409.104.000	90,91	100
a	Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah II	450.000.000	409.104.000	90,91	100
5	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di wilayah III	250.000.000	231.805.000	92,72	100
a	Penguatan Kapasitas Pemda dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah III	250.000.000	231.805.000	92,72	100
6	Jumlah laporan evaluasi kinerja	300.000.000	241.439.000	80,47	100
a	Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	150.000.000	109.445.000	72,96	100
b	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat	150.000.000	131.994.000	88,00	100
B	Output: Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah	2.100.000.000	2.038.189.000	97,06	100
1	Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	494.000.000	482.089.000	97,59	100

NO	OUTPUT/IKK/PAKET KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
a	Pembinaan Pem biayaan Infrastruktur Di Wilayah I	494.000.000	482.089.000	97,59	100
2	Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	928.300.000	881.985.000	95,01	100
a	Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Di Wilayah II	928.300.000	881.985.000	95,01	100
3	Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	677.700.000	674.115.000	99,47	100
a	Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Di Wilayah III	677.700.000	674.115.000	99,47	100
C	Output: Penyiapan dan kerjasama investasi infrastruktur jalan dan jembatan	4.250.000.000	4.037.351.000	95,00	100
1	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.500.000.000	1.465.966.000	97,73	100
a	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan	1.500.000.000	1.465.966.000	97,73	100
2	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.000.000.000	1.898.669.000	94,93	100
a	Penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	2.000.000.000	1.898.669.000	94,93	100
3	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	750.000.000	672.716.000	89,70	100
a	Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	750.000.000	672.716.000	89,70	100
D	Output: Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.300.000.000	1.201.251.000	92,40	100
1	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.300.000.000	1.201.251.000	92,40	100
a	Fasilitasi Penyiapan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan	600.000.000	534.360.000	89,06	100
b	Fasilitasi Pelaksanaan Bidding Process Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan	700.000.000	666.891.000	95,27	100
E	Output: Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.650.000.000	1.594.177.000	96,62	100
1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.650.000.000	1.594.177.000	96,62	100
a	Pemantauan Tahapan Perencanaan, Penyiapan, dan Transaksi Pelaksanaan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan	800.000.000	769.022.000	96,13	100

NO	OUTPUT/IKK/PAKET KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
b	Evaluasi Tahapan Perencanaan, Penyiapan, dan Transaksi Pelaksanaan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan	700.000.000	685.869.000	97,98	100
c	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	150.000.000	139.285.000	92,86	100
F	Output: Layanan perkantoran	1.100.000.000	884.583.000	80,42	100
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1.100.000.000	884.583.000	80,42	100
a	Operasional dan Pemeliharaan kantor	1.100.000.000	884.583.000	80,42	100

4.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Target dan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24 Sandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja TA 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	% Capaian Target	% Capaian PUG
1.	Terselenggaranya Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	1) Jumlah Materi Teknis/Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	48% dihadiri oleh peserta wanita
		2) Jumlah Materi Teknis/Dokumen Pedoman Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	45% dihadiri oleh peserta wanita
		3) Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	1 Laporan	1 Laporan	100 %	27% dihadiri oleh peserta wanita

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	% Capaian Target	% Capaian PUG
		Pembiayaan Perumahan di Wilayah I				
		4) Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	1 Laporan	1 Laporan	100 %	60% dihadiri oleh peserta wanita
		5) Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	1 Laporan	1 Laporan	100 %	60% dihadiri oleh peserta wanita
		6) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	100 %	-
2.	Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah	7) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah I yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	13 Provinsi	5 Provinsi	38,46%	20% dihadiri oleh peserta wanita
		8) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah II yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	11 Provinsi	5 Provinsi	45,45%	28% dihadiri oleh peserta wanita
		9) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah	10 Provinsi	-	0%	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	% Capaian Target	% Capaian PUG
		Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis				
3.	Penyiapan dan kerjasama investasi infrastruktur jalan dan jembatan	10) Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
		11) Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
		12) Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
4.	Pelaksanaan investasi infrastruktur jalan dan jembatan	13) Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Paket Permbia yaan	-	0 %	
5.	Pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan	14) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3 Laporan	3 Laporan	100 %	
6.	Layanan Perkantoran	15) Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100 %	-

Jika dilihat dari perbandingan target dan capaian kinerja, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target antara lain Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis dan Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Indikator kinerja Jumlah

Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis tidak dapat mencapai target karena sesuai arahan Menteri PUPR untuk tidak melanjutkan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan atau sosialisasi, sehingga kegiatan di wilayah III yang sudah direncanakan tidak dapat dilanjutkan.

Indikator kinerja Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan tidak dapat mencapai target karena Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan organisasi baru sehingga belum ada proyek KPBU yang mencapai *financial close* (FC) dibawah tanggung jawab Direktorat PPIJJ.

4.4 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Selama 5 (lima) tahun berjalan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan telah menjalankan program pembinaan sistem Pembiayaan perumahan. Berikut adalah perbandingan anggaran dan kinerja penyerapan anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan antara tahun 2015,2016,2017,2018, dan 2019:

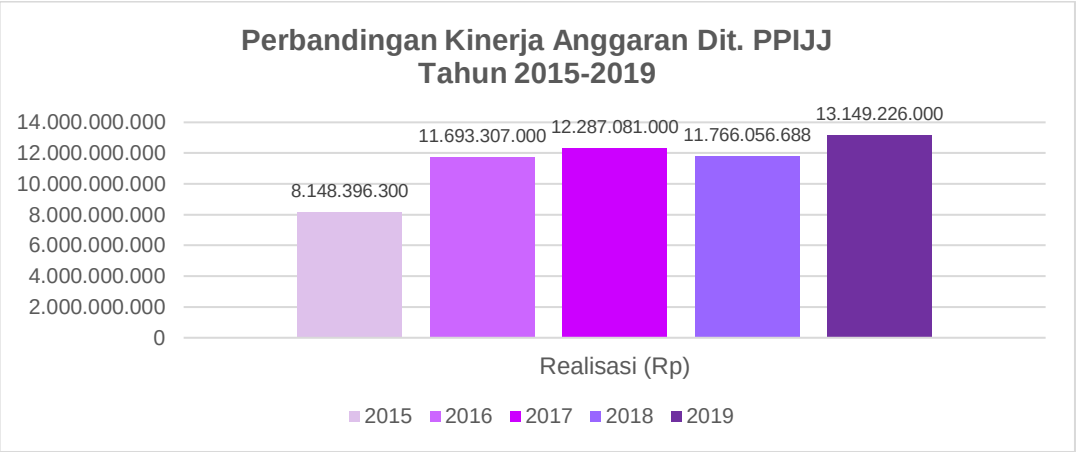

Gambar 4.18 Grafik Perbandingan Kinerja Anggaran Direktorat PPIJJ Tahun 2015-2019

Pada tahun 2015, realisasi penyerapan anggaran hanya sebesar 72% yaitu sebesar Rp 8.148.396.300,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 11.285.587.000,00. Realisasi sedikit terhambat dikarenakan kegiatan di

lingkungan Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan baru dimulai pada Bulan Juli 2015, sehingga Direktorat BSPP hanya memiliki waktu untuk melaksanakan kegiatan kurang lebih 6 (enam) bulan di tahun 2015.

Pada tahun 2016, terjadi peningkatan realisasi penyerapan anggaran sebesar 95% yaitu sebesar Rp 11.693.307.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 12.245.155.000,00. Melihat kinerja dari tahun 2015, peningkatan realisasi di tahun 2016 terlihat cukup signifikan dengan kenaikan dari 72% (pada tahun 2015) menjadi 95% (pada tahun 2016). Pencapaian realisasi di tahun 2016 ini termasuk baik. Hal ini sebagian besar dikarenakan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan dapat berjalan sesuai rencana.

Pada tahun 2017, realisasi anggaran tahun 2017 Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan sampai tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.12.287.000.000,- atau tercapai sebesar 98,01% dari total Pagu Anggaran sebesar Rp.12.536.227.000.-. Sementara penyerapan anggaran Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan berdasarkan data e-monitoring tanggal 19 Januari 2017, realisasi penyerapan dana Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan mencapai 80,7% yaitu terdapat penyerapan sebesar 13.195.135.000,- dari total anggaran sebesar Rp.16.300.000.000,- dengan realisasi progres penyerapan fisik sebesar 100%.

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,8% yaitu sebesar Rp 11.766.056.688,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 11.790.043.000,00. Melihat kinerja dari tahun 2018, peningkatan realisasi di tahun 2018 termasuk baik. Hal ini sebagian besar dikarenakan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan dapat berjalan sesuai rencana. Meskipun dalam berjalannya kegiatan Direktorat BSPP selama tahun 2018 terdapat beberapa hambatan, namun dapat diatasi dengan berbagai cara untuk tetap dapat mencapai target Direktorat BSPP.

Pada tahun 2019, terjadi sedikit penurunan realisasi penyerapan anggaran sebesar 93,92% yaitu sebesar Rp 13.149.226.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 14.000.000.000,00. Realisasi sedikit terhambat

dikarenakan kegiatan di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan baru dimulai pada Bulan Juli 2019, sehingga Direktorat BSPP hanya memiliki waktu untuk melaksanakan kegiatan kurang lebih 6 (enam) bulan di tahun 2019.

Tabel 4.25 Perbandingan Target Renstra dan Ralisasi Kinerja Direktorat Tahun 2015-2019

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan											
Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah I	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan
Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan
Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan
Jumlah laporan evaluasi kinerja	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan
Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah											
Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/Kota	10 LKB/LKBB 13 Provinsi 98 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 13 Provinsi 35 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 13 Provinsi 98 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 13 Provinsi 98 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 13 Provinsi 195 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 13 Provinsi 89 Kab/Kota	13 Provinsi	13 Provinsi	13 Provinsi	5 Provinsi
Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/Kota	10 LKB/LKBB 11 Provinsi 88 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 11 Provinsi 18 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 11 Provinsi 88 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 11 Provinsi 88 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 11 Provinsi 175 Kab/Kota	10 LKB/LKBB 11 Provinsi 125 Kab/Kota	11 Provinsi	11 Provinsi	11 Provinsi	5 Provinsi
Jumlah lembaga jasa keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/Kota	6 LKB/LKBB 10 Provinsi 72 Kab/Kota	6 LKB/LKBB 10 Provinsi 62 Kab/Kota	6 LKB/LKBB 10 Provinsi 72 Kab/Kota	6 LKB/LKBB 10 Provinsi 72 Kab/Kota	6 LKB/LKBB 10 Provinsi 144 Kab/Kota	6 LKB/LKBB 10 Provinsi 85 Kab/Kota	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	0 Provinsi
Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan											
Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah penyiapan dukungan kerjasama investasi infrastruktur jalan dan jembatan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan											
Jumlah paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	Paket Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket Pembiayaan	0 Paket Pembiayaan
Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan											
Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan
Layanan Perkantoran											
Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan

4.5 REALISASI ANGGARAN

Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di tahun 2019 dirasa kurang efektif dan efisien. Anggaran tahun 2019 dibagi menjadi 2 output besar, yaitu output Pembiayaan perumahan dan output Pembiayaan infrastruktur. Anggaran untuk pelaksanaan tusi pembiayaan infrastruktur baru dapat dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Agustus 2019. Pendanaan pelaksanaan output pembiayaan infrastruktur baru dipenuhi setelah adanya realokasi anggaran Dekonsentrasi dan Dukungan Pelaksanaan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan.

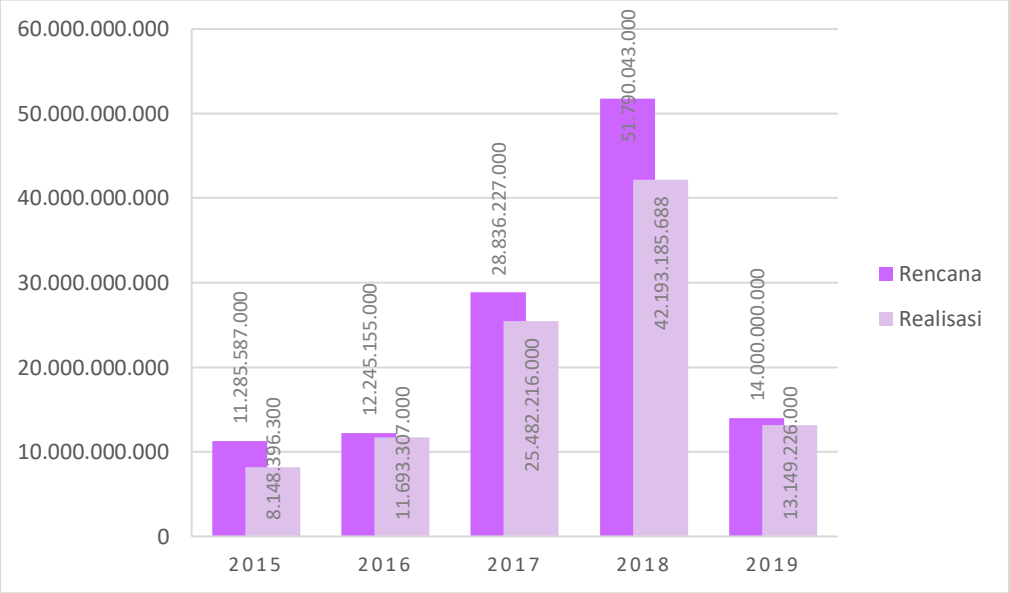

Gambar 4.19 Grafik Perbandingan Pagu Anggaran Direktorat Tahun 2015-2019

Dari uraian di atas, tentu perlu adanya upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas, salah satunya adalah dengan lain melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi review, pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

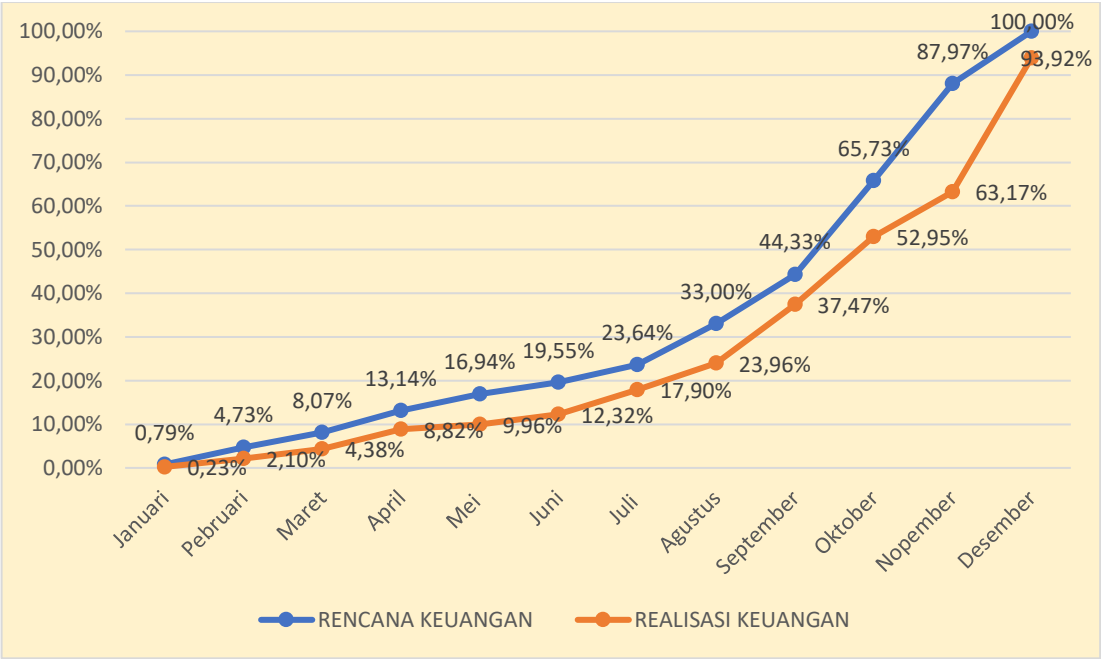

Gambar 4.20 Grafik Realisasi Anggaran Direktorat PPIJJ Tahun 2019

BAB V

PENUTUP

5.1 PERMASALAHAN

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2019 berisi akuntabilitas kinerja yang merupakan capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Dari hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian angka penyerapan akhir anggaran sebesar 93,92%, walaupun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019. Namun demikian, diharapkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang belum maksimal dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan pencapaian sebagian besar target tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Tantangan utama yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Direktorat PPIJJ adalah perubahan organisasi yang sebelumnya Ditjen Pembiayaan Perumahan menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat PPIJJ. Dengan perubahan organisasi, masih diperlukan banyak penyesuaian regulasi dan anggaran yang baru untuk melaksanakan tusi organisasi baru, serta pengetahuan mengenai skema KPBU sebagai metode pembiayaan infrastruktur yang dapat digunakan sebagai sumber dana lain selain peggunaan APBN. Dari intansi yang terkait hingga tahapan yang perlu dilakukan berbeda dengan pengadaan infrastruktur dengan sumber dana APBN termasuk tahapan lelang yang untuk menentukan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU. Adanya pembagian risiko antara pemrakarsa dan pemerintah sehingga perlunya pihak yang menjamin risiko pemerintah.

5.2 LANGKAH KEDEPAN

Agar dapat mencapai target keuangan maupun fisik yang telah ditetapkan setiap bulannya perlu dilakukan beberapa hal antara lain melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi review, pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Berdasarkan rekomendasi di atas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*), maka langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2020 yang perlu dilakukan adalah :

1. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, antara lain dengan:
   a. Segera melakukan reviu atas RKA-KL/DIPA pada awal tahun anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/ kegiatan pada kementerian/ Lembaga yang mengalami perubahan sehubungan dengan pembentukan Kabinet Indonesia Maju.
   b. Segera mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan hal tersebut melalui mekanisme revisi DIPA, apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA, misalnya “tanda blokir”.
   c. Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia dan mencukupi.
2. Melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
4. Mengantisipasi pagu minus.
5. Memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
6. Penyiapan SOP untuk menjaga konsistensi kinerja atau kondisi tertentu, dan lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas tertentu dan untuk memberikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas bagi pelaksana.
7. Penyelesaian regulasi yang berkaitan dengan tusi sehingga dapat memperjelas tanggung jawab Direktorat PPIJJ.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7571-0399-4026-4485

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 033.08.1.400812/2019

Revisi ke 01
Tanggal : 08 Mei 2019

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 194.189.000.000	(SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	179.189.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	179.189.000.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	15.000.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:7571-0399-4026-4485

Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Rp.	194.189.000.000
12.5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Rp.	67.600.000.000
12.5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.140.000.000
12.5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Rp.	30.200.000.000
12.5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	Rp.	15.500.000.000
12.5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rp.	35.379.000.000
12.5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rp.	16.370.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: I Nyoman Sutama, BE, S.Sos, M.Si
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

1 Fungsi	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			194.189.000.000
Sub Fungsi	06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN			194.189.000.000
2 Program	033.08.12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan			194.189.000.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan			
	02	Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan			
Indikator Kinerja Program	01	Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah	3.36	%	
	01	Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan		%	
Output Program	01	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	24	Dokumen	
	02	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13	Masukan Teknis	
	03	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	4	rapermen	
	04	Jumlah MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan	84	MOU	
	05	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi, Perencanaan, dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	31	Dokumen	
	06	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Melakukan Kerjasama dan Rekonsiliasi	84	Lembaga	
	07	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	Rumah Tangga	
	08	Jumlah Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan	14	Laporan	
Kegiatan	5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan			29.140.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersusunnya Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan			
	03	Jumlah Dokumen Rumusan Standar dan Kriteria Bantuan dan Kemudahan			
	04	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan			
	05	Jumlah Dokumen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan			
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	07	Jumlah MOU Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: I Nyoman Sutama, BE, S.Sos, M.Si
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Kinerja Kegiatan	08	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan			
	09	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5316.001	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan [PN]	24 Dokumen		22.340.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	02	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	
	03	Jumlah Dokumen Rumusan Standar dan Kriteria Bantuan dan Kemudahan	3	Dokumen	
	04	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan	4	Dokumen	
	05	Jumlah Dokumen Data Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	Laporan	
Output Kegiatan	5316.002	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan [PN]	84 MoU		5.700.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah MOU Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	79	MoU	
	02	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	5	MoU	
Output Kegiatan	5316.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			30.200.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pola Pembiayaan Perumahan			
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro			
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan			
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	08	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	09	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	10	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro			
	11	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan			
	12	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: I Nyoman Sutama, BE, S.Sos, M.Si
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Kinerja Kegiatan	13	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan (Bantuan Uang Muka)			
	14	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13	Materi Teknis	6.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5	Materi Teknis	
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	2	NSPK	
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	2	Materi Teknis	
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Materi Teknis	
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1	Materi Teknis	
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1	Materi Teknis	
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Laporan	
Output Kegiatan	5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan [PN]	4	Rapermen	2.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1	Rapermen	
	02	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Rapermen	
	03	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1	Rapermen	
	04	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1	Rapermen	
Output Kegiatan	5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan [PN]	312	Rumah Tangga	19.500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12	Bulan Layanan	
	02	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	Rumah Tangga	
Output Kegiatan	5317.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Layanan	
Output Program	02	Lembaga Keuangan Bank, Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Lembaga Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan	110	Lembaga	
Kegiatan	5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			15.500.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	02	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	03	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	04	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga	: (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: I Nyoman Sutama, BE, S.Sos, M.Si
Unit Organisasi	: (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01) DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Kinerja Kegiatan	05	Jumlah peningkatan portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, dana asuransi, Bapertarum PNS, dan TWP TNI POLRI untuk pembiayaan pembangunan perumahan			
	06	Jumlah peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan			
	07	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan			
	08	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan			
	09	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki produk program pembiayaan swadaya masyarakat			
	10	Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan			
	11	Jumlah laporan evaluasi kinerja			
	12	Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5318.001	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya [PN]	110 Lembaga		5.200.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memilki Portofolio Pembiayaan Perumahan	35	Lembaga	
	02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya yang memiliki Portofolio Pembiayaan Perumahan	20	Lembaga	
	03	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Memiliki Tabungan Perumahan	20	Lembaga	
	04	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Memiliki Produk Program Pembiayaan Swadaya Masyarakat	10	Lembaga	
	05	Jumlah Perusahaan yang Mengalokasikan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pembiayaan Perumahan	25	Perusahaan	
Output Kegiatan	5318.002	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder [PN]	3 Lembaga		2.450.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Prosentase Portofolio Dana Jangka Panjang BPJS, Tabungan Haji, Dana Pensiun, Asuransi, Bapertarum-PNS, dan Tabungan Wajib Perumahan TWP TNI/POLRI untuk Pembiayaan Pembangunan Perumahan	2	Lembaga	
	02	Jumlah Prosentase Peningkatan Pembiayaan Sekunder Perumahan untuk Pembiayaan Perumahan	1	Lembaga	
Output Kegiatan	5318.003	Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	7 Dokumen		6.750.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Rencana Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	2	dokumen	
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	2	NSPK	
	03	Jumlah Rancangan Kebijakan Pelaksanaan Tabungan Perumahan	1 Peraturan	Dokumen Rancangan	
	04	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2	Laporan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : I Nyoman Sutama, BE, S.Sos, M.Si
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Output Kegiatan	5318.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Output Program	03	Pemerintah Provinsi, Kab, Kota dan Stakeholders Lainnya yang Mendapat Pembinaan dan Bantuan Teknis Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Wilayah yang Mendapat Layanan Diseminasi Pembiayaan Perumahan	3	Wilayah	
	02	Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Stakeholders Lainnya yang Mendapat Pembinaan dan Bantuan Teknis Pembiayaan	34	Provinsi	
Kegiatan	5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			35.379.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	08	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah II yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis			
	09	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis			
	10	Jumlah Layanan Perkantoran			
	01	Jumlah Materi Teknis/Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Materi Teknis/Dokumen Pedoman Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			
	03	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah I			
	04	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah II			
	05	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah III			
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	07	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah I yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis			
Output Kegiatan	5319.001	Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan	9 Dokumen		4.000.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis/Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2	Dokumen	
	02	Jumlah Materi Teknis/ Dokumen Pedoman Pedoman Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2	Dokumen	
	03	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah I	1	Laporan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: I Nyoman Sutama, BE, S.Sos, M.Si
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Output Kegiatan	04	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	1	Laporan	
	05	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	1	Laporan	
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2	Laporan	
Output Kegiatan	5319.002	Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah	34 Provinsi		30.279.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah I yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	13	Provinsi	
	02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah II yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	11	Provinsi	
	03	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	10	Provinsi	
Output Kegiatan	5319.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Output Program	04	OUTPUT INTERNAL UNIT ESELON I			
Indikator Output Program	01	Jumlah Layanan Internal	1	Layanan	
Kegiatan	5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan			67.600.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi			
	02	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
	03	Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian			
	04	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
	05	Jumlah Laporan Keuangan			
	06	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang - undangan			
	07	Jumlah Laporan Pertimbangan/ Opini Hukum dan Pendampingan Hukum			
	08	Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan			
	09	Jumlah Dokumen Anggaran Bidang Pembiayaan Perumahan			
	10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Setditjen			
	11	Jumlah Renovasi Gedung dan Bangunan			
	12	Jumlah layanan perkantoran			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: I Nyoman Sutama, BE, S.Sos, M.Si
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Output Kegiatan	5315.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan		20.000.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	3	Laporan	
	02	Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian	3	Laporan	
	03	Jumlah Laporan Keuangan	5	Laporan	
	04	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan	5	Laporan	
	05	Jumlah Laporan Pertimbangan Opini Hukum dan Pendampingan Hukum	4	Laporan	
	06	Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan	5	Laporan	
	07	Jumlah Dokumen Anggaran Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	
	09	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3	Laporan	
Output Kegiatan	5315.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		2.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	124	Unit	
	02	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	153	Unit	
	03	Jumlah Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1	Layanan	
Output Kegiatan	5315.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		45.500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah layanan perkantoran	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			16.370.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah I			
	02	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah II			
	03	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah III			
	04	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah IV			
	05	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	06	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan			
	07	Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5320.001	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	14 Laporan		12.590.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan	3	Laporan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: I Nyoman Sutama, BE, S.Sos, M.Si
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

		Pembiayaan Wilayah I			
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah II	3	Laporan	
	03	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah III	3	Laporan	
	04	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah IV	3	Laporan	
	05	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2	Laporan	
Output Kegiatan	5320.002	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	4 Dokumen		2.680.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	4	Dokumen	
Output Kegiatan	5320.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:7571-0399-4026-4485

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	194.189.000.000
1. Rupiah Murni	Rp.	179.189.000.000
2. PNBP	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Ket :

			Pagu		Ekuivalen Rupiah
a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RPLN	US$	1.000.000	Rp.	15.000.000.000
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	INTERNATIONALBANKFORRE	USD	1.000,00					
		8717-ID	USD	1.000,00					
		1HG72SWA	IDR	15.000.000,00	3	15.000.000			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:7571-0399-4026-4485

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400812	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**22.765.535**	**168.923.465**	**2.500.000**	**-**	**-**	**194.189.000**		
033.08.12	**Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**	**22.765.535**	**168.923.465**	**2.500.000**	**-**	**-**	**194.189.000**		
5315	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**	**22.765.535**	**42.734.465**	**2.100.000**	**-**	**-**	**67.600.000**		
5315.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	01 . 54	
01	RM	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	139	
5315.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	2.100.000	-	-	2.100.000	01 . 54	
01	RM	-	-	2.100.000	-	-	2.100.000	139	
5315.994	Layanan Perkantoran	22.765.535	22.734.465	-	-	-	45.500.000	01 . 54	
01	RM	22.765.535	22.734.465	-	-	-	45.500.000	139	
5316	**Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan**	**-**	**29.140.000**	**-**	**-**	**-**	**29.140.000**		
5316.001	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan [PN]	-	22.340.000	-	-	-	22.340.000	01 . 54	
01	RM	-	18.840.000	-	-	-	18.840.000	139	
02	PLN	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	140	RK 1HG72SWA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:7571-0399-4026-4485

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5316.002	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan [PN]	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	01 . 54	
01	RM	-	4.200.000	-	-	-	4.200.000	139	
02	PLN	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	140	RK 1HG72SWA
5316.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
5317	**Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan**	**-**	**29.800.000**	**400.000**	**-**	**-**	**30.200.000**		
5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	-	6.800.000	-	-	-	6.800.000	01 . 00	
01	RM	-	6.800.000	-	-	-	6.800.000	139	
5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan [PN]	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	01 . 54	
01	RM	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	139	
5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan [PN]	-	19.100.000	400.000	-	-	19.500.000	01 . 54	
01	RM	-	9.100.000	400.000	-	-	9.500.000	139	
02	PLN	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	140	RK 1HG72SWA
5317.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:7571-0399-4026-4485

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
5318	**Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan**	**-**	**15.500.000**	**-**	**-**	**-**	**15.500.000**		
5318.001	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya [PN]	-	5.200.000	-	-	-	5.200.000	01 . 54	
01	RM	-	5.200.000	-	-	-	5.200.000	139	
5318.002	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder [PN]	-	2.450.000	-	-	-	2.450.000	01 . 54	
01	RM	-	2.450.000	-	-	-	2.450.000	139	
5318.003	Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	-	6.750.000	-	-	-	6.750.000	01 . 54	
01	RM	-	6.750.000	-	-	-	6.750.000	139	
5318.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
5319	**Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**-**	**35.379.000**	**-**	**-**	**-**	**35.379.000**		
5319.001	Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	01 . 54	
01	RM	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	139	
5319.002	Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah	-	30.279.000	-	-	-	30.279.000	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:7571-0399-4026-4485

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	30.279.000	-	-	-	30.279.000	139@	
5319.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
5320	**Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan**	**-**	**16.370.000**	**-**	**-**	**-**	**16.370.000**		
5320.001	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	12.590.000	-	-	-	12.590.000	01 . 54	
01	RM	-	12.590.000	-	-	-	12.590.000	139	
5320.002	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	2.680.000	-	-	-	2.680.000	01 . 54	
01	RM	-	2.680.000	-	-	-	2.680.000	139	
5320.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
	JUMLAH	**22.765.535**	**168.923.465**	**2.500.000**	**-**	**-**	**194.189.000**		

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**400812**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.995.179	6.423.171	6.088.355	9.299.277	25.446.697	20.691.569	26.950.239	32.944.129	25.192.569	17.441.009	13.965.229	7.751.577	194.189.000
		51 BELANJA PEGAWAI	0	3.021.897	1.617.259	1.971.712	1.129.413	1.365.932	2.276.553	3.870.140	2.959.519	2.048.898	1.593.587	910.625	22.765.535
		52 BELANJA BARANG	1.995.179	3.134.660	4.412.236	7.327.565	23.928.758	19.199.637	24.463.686	28.716.989	21.960.050	15.203.111	11.824.642	6.756.952	168.923.465
		53 BELANJA MODAL	0	266.614	58.860	0	388.526	126.000	210.000	357.000	273.000	189.000	547.000	84.000	2.500.000
	033.08.12.5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	1.936.139	4.868.082	4.605.825	6.478.050	5.095.900	4.055.999	6.759.999	11.491.999	8.787.999	6.083.999	4.731.999	2.704.010	67.600.000
		51 BELANJA PEGAWAI	0	3.021.897	1.617.259	1.971.712	1.129.413	1.365.932	2.276.553	3.870.140	2.959.519	2.048.898	1.593.587	910.625	22.765.535
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.936.139	1.579.571	2.929.706	4.506.338	3.577.961	2.564.067	4.273.446	7.264.859	5.555.480	3.846.101	2.991.412	1.709.385	42.734.465
		53 BELANJA MODAL	0	266.614	58.860	0	388.526	126.000	210.000	357.000	273.000	189.000	147.000	84.000	2.100.000
	033.08.12.5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	4.755	292.511	344.644	449.471	5.028.018	3.788.200	4.662.400	4.953.800	3.788.200	2.622.600	2.039.800	1.165.601	29.140.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.755	292.511	344.644	449.471	5.028.018	3.788.200	4.662.400	4.953.800	3.788.200	2.622.600	2.039.800	1.165.601	29.140.000
	033.08.12.5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	21.382	553.899	431.032	649.146	4.602.539	3.874.000	4.768.000	5.066.000	3.874.000	2.682.000	2.486.000	1.192.002	30.200.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	21.382	553.899	431.032	649.146	4.602.539	3.874.000	4.768.000	5.066.000	3.874.000	2.682.000	2.086.000	1.192.002	29.800.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
	033.08.12.5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	0	45.683	365.116	658.189	1.955.010	2.246.000	2.480.000	2.635.000	2.015.000	1.395.000	1.085.000	620.002	15.500.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	45.683	365.116	658.189	1.955.010	2.246.000	2.480.000	2.635.000	2.015.000	1.395.000	1.085.000	620.002	15.500.000
	033.08.12.5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	32.903	467.039	147.198	381.953	6.400.497	4.599.270	5.660.640	6.014.430	4.599.270	3.184.110	2.476.530	1.415.160	35.379.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	32.903	467.039	147.198	381.953	6.400.497	4.599.270	5.660.640	6.014.430	4.599.270	3.184.110	2.476.530	1.415.160	35.379.000
	033.08.12.5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	0	195.957	194.540	682.468	2.364.733	2.128.100	2.619.200	2.782.900	2.128.100	1.473.300	1.145.900	654.802	16.370.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	195.957	194.540	682.468	2.364.733	2.128.100	2.619.200	2.782.900	2.128.100	1.473.300	1.145.900	654.802	16.370.000

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IV A. B L O K I R

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [08] DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [400812] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
400812	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	21.743.000
	52 Belanja Barang	Rp.	21.743.000
033.08.12	**Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**		
5315	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**		
5319	**Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan**		
5319.002	**Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah**		
	521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)		1.960.100
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.960.100
	harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi masih harus didistribusikan ke masing-masing satker		
	521211 Belanja Bahan(RM)		1.889.060
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.889.060
	harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi masih harus didistribusikan ke masing-masing satker		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		2.017.900
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.017.900
	harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi masih harus didistribusikan ke masing-masing satker		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		728.944
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	728.944
	harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi masih harus didistribusikan ke masing-masing satker		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		2.380.000
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.380.000
	harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi masih harus didistribusikan ke masing-masing satker		
	522141 Belanja Sewa(RM)		2.210.000
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.210.000
	harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi masih harus didistribusikan ke masing-masing satker		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		1.492.600
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.492.600
	harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi masih harus didistribusikan ke masing-masing satker		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		1.073.520
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.073.520
	harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi masih harus didistribusikan ke masing-masing satker		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		4.222.871
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	4.222.871
	harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi masih harus didistribusikan ke masing-masing satker		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		3.768.005
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.768.005
	harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi masih harus didistribusikan ke masing-masing satker		

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IV B. C A T A T A N

DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [08] DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [400812] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
400812	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**				
033.08.12	**Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**				
5315	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**				
5315.951	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	Rp.	410.000		
536111	Belanja Modal Lainnya				
	* Dalam rangka pembangunan/renovasi gedung 512 M	Rp.	410.000		

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

LAMPIRAN 2

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

Nomor : UM 0102-PS /422 Jakarta, 27 Agustus 2019
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Hal : Persiapan Rencana Revisi Anggaran Ke-3 TA. 2019

Kepada Yth.:
1. Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi
2. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA
3. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
4. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
5. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Insfrastrukur Permukiman
6. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
7. PPK Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
8. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

di -
Tempat

Dalam rangka rencana revisi anggaran ke-3 TA. 2019, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : RR. 1 Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Lantai 2 Wings 3
Agenda :
1. Realisasi Anggaran TA. 2019 masing-masing unit kerja
2. Prognosa realisasi pelaksanaan anggaran TA. 2019
3. Kebutuhan revisi anggaran (Setditjen PI)
   a. Gaji dan tunjangan (akan dipenuhi dari realokasi anggaran sisa lelang Ditjen Cipta Karya)
   b. Likuidasi Satker Dekonsentrasi
   c. Kebutuhan Belanja Modal
   d. Kebutuhan perayaan hari-hari besar
4. Rencana pergeseran anggaran yang bisa dilakukan (masing-masing unit kerja)

Mohon kiranya masing-masing unit kerja dapat menyiapkan estimasi sisa anggaran untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran sebagaimana agenda 3.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

an. Sekretaris Direktorat Jenderal
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran dan Evaluasi

Eko Suhendratma, S.Si, MA
NIP. 19691011996031003

Tembusan Yth.:
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

LAMPIRAN 3

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0456-2792-4872-0041

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 033.08.1.400812/2019

Revisi ke 02
Tanggal : 09 Agustus 2019

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 215.489.086.000	(DUA RATUS LIMA BELAS MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	179.189.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	36.300.086.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	36.300.086.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	179.189.000.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	36.300.086.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:0456-2792-4872-0041

Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Rp.	215.489.086.000
12.5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Rp.	67.600.000.000
12.5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.140.000.000
12.5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Rp.	60.579.086.000
12.5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	Rp.	19.550.000.000
12.5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rp.	16.900.000.000
12.5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rp.	21.720.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga	: (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01) DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

1	Fungsi	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			215.489.086.000
	Sub Fungsi	06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN			215.489.086.000
2	Program	033.08.12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan			215.489.086.000
	Sasaran Program	01	Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan			
		02	Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan			
	Indikator Kinerja Program	01	Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah	3.36	%	
		01	Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan		%	
	Output Program	01	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
	Indikator Output Program	01	Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	24	Dokumen	
		02	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13	Masukan Teknis	
		03	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	4	rapermen	
		04	Jumlah MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan	84	MOU	
		05	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi, Perencanaan, dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	31	Dokumen	
		06	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Melakukan Kerjasama dan Rekonsiliasi	84	Lembaga	
		07	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	Rumah Tangga	
		08	Jumlah Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan	14	Laporan	
	Kegiatan	5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan			29.140.000.000
	Sasaran Kegiatan	01	Tersusunnya Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan			
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan			
		02	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan			
		03	Jumlah Dokumen Rumusan Standar dan Kriteria Bantuan dan Kemudahan			
		04	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan			
		05	Jumlah Dokumen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan			
		06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
		07	Jumlah MOU Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Kinerja Kegiatan	08	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan			
	09	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5316.001	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan [PN]	24 Dokumen		22.340.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	02	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	
	03	Jumlah Dokumen Rumusan Standar dan Kriteria Bantuan dan Kemudahan	3	Dokumen	
	04	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan	4	Dokumen	
	05	Jumlah Dokumen Data Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	Laporan	
Output Kegiatan	5316.002	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan [PN]	84 MoU		5.700.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah MOU Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	79	MoU	
	02	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	5	MoU	
Output Kegiatan	5316.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			60.579.086.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pola Pembiayaan Perumahan			
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro			
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan			
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	08	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	09	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	10	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro			
	11	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan			
	12	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Indikator Kinerja Kegiatan	13	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan (Bantuan Uang Muka)			
	14	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13	Materi Teknis	6.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5	Materi Teknis	
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	2	NSPK	
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	2	Materi Teknis	
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Materi Teknis	
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1	Materi Teknis	
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1	Materi Teknis	
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Laporan	
Output Kegiatan	5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan [PN]	4	Rapermen	2.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1	Rapermen	
	02	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Rapermen	
	03	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1	Rapermen	
	04	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1	Rapermen	
Output Kegiatan	5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan [PN]	312	Rumah Tangga	46.500.086.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12	Bulan Layanan	
	02	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	Rumah Tangga	
Output Kegiatan	5317.004	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	1	JAKSTRA	859.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1	Jakstra	
	02	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	0	Dokumen	
Output Kegiatan	5317.005	Pelaksanaan Investasi Perumahan	1	PAKET PEMBIAYAAN	840.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	0	Dokumen	
	02	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	1	Paket Pembiayaan	
Output Kegiatan	5317.006	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	DRAFT NSPK	840.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Draft NSPK	
Output Kegiatan	5317.007	Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2	LAPORAN	840.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2	Laporan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga	: (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01) DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Output Kegiatan	5317.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Layanan	
Output Program	02	Lembaga Keuangan Bank, Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Lembaga Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan	110	Lembaga	
Kegiatan	5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			19.550.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	02	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	03	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	04	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	05	Jumlah peningkatan portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, dana asuransi, Bapertarum PNS, dan TWP TNI POLRI untuk pembiayaan pembangunan perumahan			
	06	Jumlah peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan			
	07	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan			
	08	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan			
	09	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki produk program pembiayaan swadaya masyarakat			
	10	Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan			
	11	Jumlah laporan evaluasi kinerja			
	12	Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5318.001	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya [PN]	110 Lembaga		5.200.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memilki Portofolio Pembiayaan Perumahan	35	Lembaga	
	02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya yang memiliki Portofolio Pembiayaan Perumahan	20	Lembaga	
	03	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Memiliki Tabungan Perumahan	20	Lembaga	
	04	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Memiliki Produk Program Pembiayaan Swadaya Masyarakat	10	Lembaga	
	05	Jumlah Perusahaan yang Mengalokasikan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pembiayaan Perumahan	25	Perusahaan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Output Kegiatan	5318.002	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder [PN]	3 Lembaga		1.875.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Prosentase Portofolio Dana Jangka Panjang BPJS, Tabungan Haji, Dana Pensiun, Asuransi, Bapertarum-PNS, dan Tabungan Wajib Perumahan TWP TNI/POLRI untuk Pembiayaan Pembangunan Perumahan	2	Lembaga	
	02	Jumlah Prosentase Peningkatan Pembiayaan Sekunder Perumahan untuk Pembiayaan Perumahan	1	Lembaga	
Output Kegiatan	5318.003	Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	9 Dokumen		6.150.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Rencana Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	2	dokumen	
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	2	NSPK	
	03	Jumlah Rancangan Kebijakan Pelaksanaan Tabungan Perumahan	1 Peraturan	Dokumen Rancangan	
	04	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2	Laporan	
Output Kegiatan	5318.004	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	3 DOKUMEN		1.800.000.000
Output Kegiatan	5318.005	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1 PAKET PEMBIAYAAN		2.425.000.000
Output Kegiatan	5318.006	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	2 LAPORAN		1.000.000.000
Output Kegiatan	5318.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Output Program	03	Pemerintah Provinsi, Kab, Kota dan Stakeholders Lainnya yang Mendapat Pembinaan dan Bantuan Teknis Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Wilayah yang Mendapat Layanan Diseminasi Pembiayaan Perumahan	3	Wilayah	
	02	Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Stakeholders Lainnya yang Mendapat Pembinaan dan Bantuan Teknis Pembiayaan	34	Provinsi	
Kegiatan	5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			16.900.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis/Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Materi Teknis/Dokumen Pedoman Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			
	03	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah I			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga	: (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01) DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Kinerja Kegiatan	04	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah II			
	05	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah III			
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	07	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah I yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis			
	08	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah II yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis			
	09	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis			
	10	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5319.001	Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan	9 Dokumen		4.000.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis/Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2	Dokumen	
	02	Jumlah Materi Teknis/ Dokumen Pedoman Pedoman Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2	Dokumen	
	03	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah I	1	Laporan	
	04	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	1	Laporan	
	05	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	1	Laporan	
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2	Laporan	
Output Kegiatan	5319.002	Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah	34 Provinsi		3.000.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah I yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	13	Provinsi	
	02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah II yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	11	Provinsi	
	03	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	10	Provinsi	
Output Kegiatan	5319.003	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3 DOKUMEN		5.250.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Dokumen	
	02	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Dokumen	
	03	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Dokumen	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Output Kegiatan	5319.004	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 PAKET PEMBIAYAAN		1.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Paket Pembiayaan	
Output Kegiatan	5319.005	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3 LAPORAN		1.750.000.000
Output Kegiatan	5319.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Output Program	04	OUTPUT INTERNAL UNIT ESELON I			
Indikator Output Program	01	Jumlah Layanan Internal	1	Layanan	
Kegiatan	5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan			67.600.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi			
	02	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
	03	Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian			
	04	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
	05	Jumlah Laporan Keuangan			
	06	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang - undangan			
	07	Jumlah Laporan Pertimbangan/ Opini Hukum dan Pendampingan Hukum			
	08	Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan			
	09	Jumlah Dokumen Anggaran Bidang Pembiayaan Perumahan			
	10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Setditjen			
	11	Jumlah Renovasi Gedung dan Bangunan			
	12	Jumlah layanan perkantoran			
Output Kegiatan	5315.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan		20.000.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	3	Laporan	
	02	Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian	3	Laporan	
	03	Jumlah Laporan Keuangan	5	Laporan	
	04	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan	5	Laporan	
	05	Jumlah Laporan Pertimbangan Opini Hukum dan Pendampingan Hukum	4	Laporan	
	06	Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan	5	Laporan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Indikator Output Kegiatan	07	Jumlah Dokumen Anggaran Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	
	09	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3	Laporan	
Output Kegiatan	5315.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		2.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	124	Unit	
	02	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	153	Unit	
	03	Jumlah Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1	Layanan	
Output Kegiatan	5315.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		45.500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah layanan perkantoran	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			21.720.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah I			
	02	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah II			
	03	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah III			
	04	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah IV			
	05	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	06	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan			
	07	Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5320.001	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	14 Laporan		12.590.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah I	3	Laporan	
	02	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah II	3	Laporan	
	03	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah III	3	Laporan	
	04	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah IV	3	Laporan	
	05	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2	Laporan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Output Kegiatan	5320.002	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	4 Dokumen		2.680.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	4	Dokumen	
Output Kegiatan	5320.003	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	3 DOKUMEN		1.950.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1	Dokumen	
	02	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	1	Dokumen	
	03	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	1	Dokumen	
Output Kegiatan	5320.004	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	1 PAKET PEMBIAYAAN		1.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1	Paket Pembiayaan	
Output Kegiatan	5320.005	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	2 LAPORAN		1.600.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	2	Laporan	
Output Kegiatan	5320.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:0456-2792-4872-0041

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	215.489.086.000
1. Rupiah Murni	Rp.	179.189.000.000
2. PNBP	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	36.300.086.000
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Ket :

			Pagu		Ekuivalen Rupiah
a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RPLN	US$	2.420.006	Rp.	36.300.086.000
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	INTERNATIONALBANKFORRE	USD	1.000,00					
		8717-ID	USD	1.000,00					
		1HG72SWA	IDR	36.300.086,00	3	36.300.086			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:0456-2792-4872-0041

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400812	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**22.765.535**	**190.623.551**	**2.100.000**	**-**	**-**	**215.489.086**		
033.08.12	**Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**	**22.765.535**	**190.623.551**	**2.100.000**	**-**	**-**	**215.489.086**		
5315	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**	**22.765.535**	**42.734.465**	**2.100.000**	**-**	**-**	**67.600.000**		
5315.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	01 . 54	
01	RM	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	139	
5315.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	2.100.000	-	-	2.100.000	01 . 54	
01	RM	-	-	2.100.000	-	-	2.100.000	139	
5315.994	Layanan Perkantoran	22.765.535	22.734.465	-	-	-	45.500.000	01 . 54	
01	RM	22.765.535	22.734.465	-	-	-	45.500.000	139	
5316	**Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan**	**-**	**29.140.000**	**-**	**-**	**-**	**29.140.000**		
5316.001	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan [PN]	-	22.340.000	-	-	-	22.340.000	01 . 54	
01	RM	-	18.840.000	-	-	-	18.840.000	139	
02	PLN	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	140	RK 1HG72SWA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:0456-2792-4872-0041

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5316.002	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan [PN]	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	01 . 54	
01	RM	-	4.200.000	-	-	-	4.200.000	139	
02	PLN	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	140	RK 1HG72SWA
5316.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
5317	**Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan**	**-**	**60.579.086**	**-**	**-**	**-**	**60.579.086**		
5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	-	6.800.000	-	-	-	6.800.000	01 . 00	
01	RM	-	6.800.000	-	-	-	6.800.000	139	
5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan [PN]	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	01 . 54	
01	RM	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	139	
5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan [PN]	-	46.500.086	-	-	-	46.500.086	01 . 54	
01	RM	-	15.200.000	-	-	-	15.200.000	139	
02	PLN	-	31.300.086	-	-	-	31.300.086	140	RK 1HG72SWA
5317.004	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	-	859.000	-	-	-	859.000	01 . 00	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:0456-2792-4872-0041

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	859.000	-	-	-	859.000	139	
5317.005	Pelaksanaan Investasi Perumahan	-	840.000	-	-	-	840.000	01 . 00	
01	RM	-	840.000	-	-	-	840.000	139	
5317.006	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	840.000	-	-	-	840.000	01 . 00	
01	RM	-	840.000	-	-	-	840.000	139	
5317.007	Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	840.000	-	-	-	840.000	01 . 00	
01	RM	-	840.000	-	-	-	840.000	139	
5317.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
5318	**Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan**	**-**	**19.550.000**	**-**	**-**	**-**	**19.550.000**		
5318.001	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya [PN]	-	5.200.000	-	-	-	5.200.000	01 . 54	
01	RM	-	5.200.000	-	-	-	5.200.000	139	
5318.002	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder [PN]	-	1.875.000	-	-	-	1.875.000	01 . 54	
01	RM	-	1.875.000	-	-	-	1.875.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:0456-2792-4872-0041

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5318.003	Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	-	6.150.000	-	-	-	6.150.000	01 . 54	
01	RM	-	6.150.000	-	-	-	6.150.000	139	
5318.004	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	01 . 54	
01	RM	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	139	
5318.005	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	-	2.425.000	-	-	-	2.425.000	01 . 54	
01	RM	-	2.425.000	-	-	-	2.425.000	139	
5318.006	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	139	
5318.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
5319	**Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**-**	**16.900.000**	**-**	**-**	**-**	**16.900.000**		
5319.001	Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	01 . 54	
01	RM	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	139	
5319.002	Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:0456-2792-4872-0041

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	139	
5319.003	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	-	5.250.000	-	-	-	5.250.000	01 . 54	
01	RM	-	5.250.000	-	-	-	5.250.000	139	
5319.004	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	01 . 54	
01	RM	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	139	
5319.005	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	-	1.750.000	-	-	-	1.750.000	01 . 54	
01	RM	-	1.750.000	-	-	-	1.750.000	139	
5319.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
5320	**Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan**	**-**	**21.720.000**	**-**	**-**	**-**	**21.720.000**		
5320.001	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	12.590.000	-	-	-	12.590.000	01 . 54	
01	RM	-	12.590.000	-	-	-	12.590.000	139	
5320.002	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	2.680.000	-	-	-	2.680.000	01 . 54	
01	RM	-	2.680.000	-	-	-	2.680.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:0456-2792-4872-0041

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5320.003	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	-	1.950.000	-	-	-	1.950.000	01 . 54	
01	RM	-	1.950.000	-	-	-	1.950.000	139	
5320.004	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	01 . 54	
01	RM	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	139	
5320.005	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000	01 . 54	
01	RM	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000	139	
5320.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
	JUMLAH	**22.765.535**	**190.623.551**	**2.100.000**	**-**	**-**	**215.489.086**		

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**400812**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.258.513	6.692.248	6.786.925	10.446.682	20.408.014	22.023.343	19.342.282	43.644.403	28.305.591	26.243.579	18.219.285	11.118.221	215.489.086
		51 BELANJA PEGAWAI	0	3.021.897	1.617.259	1.971.712	1.129.413	1.365.932	2.276.554	3.870.141	2.959.520	2.048.898	1.593.587	910.622	22.765.535
		52 BELANJA BARANG	2.258.513	3.403.737	5.110.806	8.474.970	18.890.075	20.531.411	16.855.728	39.417.262	25.073.071	24.005.681	16.478.698	10.123.599	190.623.551
		53 BELANJA MODAL	0	266.614	58.860	0	388.526	126.000	210.000	357.000	273.000	189.000	147.000	84.000	2.100.000
	033.08.12.5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	1.936.140	4.868.082	4.605.826	6.478.050	5.095.901	4.056.000	6.760.001	11.492.000	8.788.000	6.084.000	4.732.000	2.704.000	67.600.000
		51 BELANJA PEGAWAI	0	3.021.897	1.617.259	1.971.712	1.129.413	1.365.932	2.276.554	3.870.141	2.959.520	2.048.898	1.593.587	910.622	22.765.535
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.936.140	1.579.571	2.929.707	4.506.338	3.577.962	2.564.068	4.273.447	7.264.859	5.555.480	3.846.102	2.991.413	1.709.378	42.734.465
		53 BELANJA MODAL	0	266.614	58.860	0	388.526	126.000	210.000	357.000	273.000	189.000	147.000	84.000	2.100.000
	033.08.12.5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	268.088	594.456	1.043.212	1.596.872	1.678.464	1.864.960	3.237.454	3.150.034	3.415.208	3.485.144	3.901.846	4.904.262	29.140.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	268.088	594.456	1.043.212	1.596.872	1.678.464	1.864.960	3.237.454	3.150.034	3.415.208	3.485.144	3.901.846	4.904.262	29.140.000
	033.08.12.5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	21.382	553.899	431.032	649.147	4.556.130	8.540.283	37.627	19.113.469	8.540.283	11.439.135	5.513.539	1.183.160	60.579.086
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	21.382	553.899	431.032	649.147	4.556.130	8.540.283	37.627	19.113.469	8.540.283	11.439.135	5.513.539	1.183.160	60.579.086
	033.08.12.5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	0	45.683	365.117	658.190	3.036.510	2.541.500	3.128.000	3.323.500	2.541.500	1.759.500	1.368.500	782.000	19.550.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	45.683	365.117	658.190	3.036.510	2.541.500	3.128.000	3.323.500	2.541.500	1.759.500	1.368.500	782.000	19.550.000
	033.08.12.5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	32.903	434.170	147.198	381.954	2.552.776	2.197.000	2.704.000	2.873.000	2.197.000	1.521.000	1.183.000	675.999	16.900.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	32.903	434.170	147.198	381.954	2.552.776	2.197.000	2.704.000	2.873.000	2.197.000	1.521.000	1.183.000	675.999	16.900.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	033.08.12.5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	0	195.958	194.540	682.469	3.488.233	2.823.600	3.475.200	3.692.400	2.823.600	1.954.800	1.520.400	868.800	21.720.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	195.958	194.540	682.469	3.488.233	2.823.600	3.475.200	3.692.400	2.823.600	1.954.800	1.520.400	868.800	21.720.000

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IV A. B L O K I R

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [08] DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [400812] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IV B. C A T A T A N

DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [08] DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [400812] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
400812	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**				
033.08.12	**Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**				
5315	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**				
5315.951	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	Rp.	410.000		
536111	Belanja Modal Lainnya				
	* Dalam rangka pembangunan/renovasi gedung 512 M	Rp.	410.000		

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

LAMPIRAN 4

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2395-2505-3477-6025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 033.08.1.400812/2019

Revisi ke 03
Tanggal : 04 November 2019

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 219.260.539.000	(DUA RATUS SEMBILAN BELAS MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	182.960.453.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	36.300.086.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	36.300.086.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139)	Rp.	182.960.453.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140)	Rp.	36.300.086.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:2395-2505-3477-6025

Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Rp.	219.260.539.000
12.5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Rp.	77.581.453.000
12.5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.140.000.000
12.5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Rp.	59.394.086.000
12.5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	Rp.	18.625.000.000
12.5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rp.	14.000.000.000
12.5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rp.	20.520.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga	: (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01) DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

1	Fungsi	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			219.260.539.000
	Sub Fungsi	06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN			219.260.539.000
2	Program	033.08.12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan			219.260.539.000
	Sasaran Program	01	Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan			
		02	Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan			
	Indikator Kinerja Program	01	Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah	3.36	%	
		01	Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan		%	
	Output Program	01	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
	Indikator Output Program	01	Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	24	Dokumen	
		02	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13	Masukan Teknis	
		03	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	4	rapermen	
		04	Jumlah MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan	84	MOU	
		05	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi, Perencanaan, dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	31	Dokumen	
		06	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Melakukan Kerjasama dan Rekonsiliasi	84	Lembaga	
		07	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	Rumah Tangga	
		08	Jumlah Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan	14	Laporan	
	Kegiatan	5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan			29.140.000.000
	Sasaran Kegiatan	01	Tersusunnya Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan			
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan			
		02	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan			
		03	Jumlah Dokumen Rumusan Standar dan Kriteria Bantuan dan Kemudahan			
		04	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan			
		05	Jumlah Dokumen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan			
		06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
		07	Jumlah MOU Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga	: (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01) DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Kinerja Kegiatan	08	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan			
	09	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5316.001	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan [PN]	24 Dokumen		20.228.062.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	02	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	
	03	Jumlah Dokumen Rumusan Standar dan Kriteria Bantuan dan Kemudahan	3	Dokumen	
	04	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan	4	Dokumen	
	05	Jumlah Dokumen Data Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	Laporan	
Output Kegiatan	5316.002	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan [PN]	84 MoU		5.711.938.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah MOU Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	79	MoU	
	02	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	5	MoU	
Output Kegiatan	5316.003	Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2 Draft Jakstra dan NSPK		500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2	Draft Jakstra dan NSPK	
Output Kegiatan	5316.004	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4 PROFIL RISIKO		1.000.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Profil Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4	Profil Risiko	
Output Kegiatan	5316.005	Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1 DOKUMEN		300.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Dokumen	
Output Kegiatan	5316.006	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1 LAPORAN		300.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Laporan	
Output Kegiatan	5316.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			59.394.086.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pola Pembiayaan Perumahan			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Kinerja Kegiatan	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro			
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan			
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	08	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	09	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	10	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro			
	11	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan			
	12	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan			
	13	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan (Bantuan Uang Muka)			
	14	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13 Materi Teknis		6.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5	Materi Teknis	
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	2	NSPK	
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	2	Materi Teknis	
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Materi Teknis	
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1	Materi Teknis	
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1	Materi Teknis	
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Laporan	
Output Kegiatan	5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan [PN]	4 Rapermen		2.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1	Rapermen	
	02	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Rapermen	
	03	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1	Rapermen	
	04	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1	Rapermen	
Output Kegiatan	5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan [PN]	312 Rumah Tangga		46.500.086.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12	Bulan Layanan	
	02	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	Rumah Tangga	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Output Kegiatan	5317.004	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	1 JAKSTRA		434.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1	Jakstra	
	02	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	0	Dokumen	
Output Kegiatan	5317.005	Pelaksanaan Investasi Perumahan	1 PAKET PEMBIAYAAN		420.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	0	Dokumen	
	02	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	1	Paket Pembiayaan	
Output Kegiatan	5317.006	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 DRAFT NSPK		500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Draft NSPK	
Output Kegiatan	5317.007	Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2 LAPORAN		840.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2	Laporan	
Output Kegiatan	5317.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Layanan	
Output Program	02	Lembaga Keuangan Bank, Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Lembaga Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan	110	Lembaga	
Kegiatan	5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			18.625.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	02	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	03	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	04	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	05	Jumlah peningkatan portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, dana asuransi, Bapertarum PNS, dan TWP TNI POLRI untuk pembiayaan pembangunan perumahan			
	06	Jumlah peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan			
	07	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan			
	08	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan			
	09	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki produk program pembiayaan swadaya masyarakat			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga	: (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01) DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Kinerja Kegiatan	10	Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan			
	11	Jumlah laporan evaluasi kinerja			
	12	Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5318.001	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya [PN]	110	Lembaga	5.200.000.000
Indikator Output Kegiatan	05	Jumlah Perusahaan yang Mengalokasikan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pembiayaan Perumahan	25	Perusahaan	
	01	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memilki Portofolio Pembiayaan Perumahan	35	Lembaga	
	02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya yang memiliki Portofolio Pembiayaan Perumahan	20	Lembaga	
	03	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Memiliki Tabungan Perumahan	20	Lembaga	
	04	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Memiliki Produk Program Pembiayaan Swadaya Masyarakat	10	Lembaga	
Output Kegiatan	5318.002	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder [PN]	3	Lembaga	1.875.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Prosentase Portofolio Dana Jangka Panjang BPJS, Tabungan Haji, Dana Pensiun, Asuransi, Bapertarum-PNS, dan Tabungan Wajib Perumahan TWP TNI/POLRI untuk Pembiayaan Pembangunan Perumahan	2	Lembaga	
	02	Jumlah Prosentase Peningkatan Pembiayaan Sekunder Perumahan untuk Pembiayaan Perumahan	1	Lembaga	
Output Kegiatan	5318.003	Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	9	Dokumen	5.850.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Rencana Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	2	dokumen	
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	2	NSPK	
	03	Jumlah Rancangan Kebijakan Pelaksanaan Tabungan Perumahan	1	Dokumen Rancangan Peraturan	
	04	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2	Laporan	
Output Kegiatan	5318.004	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	3	DOKUMEN	1.800.000.000
Output Kegiatan	5318.005	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1	PAKET PEMBIAYAAN	2.000.000.000
Output Kegiatan	5318.006	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	2	LAPORAN	800.000.000
Output Kegiatan	5318.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Output Program	03	Pemerintah Provinsi, Kab, Kota dan Stakeholders Lainnya yang Mendapat Pembinaan dan Bantuan Teknis Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Wilayah yang Mendapat Layanan Diseminasi Pembiayaan Perumahan	3	Wilayah	
	02	Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Stakeholders Lainnya yang Mendapat Pembinaan dan Bantuan Teknis Pembiayaan	34	Provinsi	
Kegiatan	5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			14.000.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis/Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Materi Teknis/Dokumen Pedoman Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			
	03	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah I			
	04	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah II			
	05	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah III			
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	07	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah I yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis			
	08	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah II yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis			
	09	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis			
	10	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5319.001	Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan	9 Dokumen		3.600.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis/Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2	Dokumen	
	02	Jumlah Materi Teknis/ Dokumen Pedoman Pedoman Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2	Dokumen	
	03	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah I	1	Laporan	
	04	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	1	Laporan	
	05	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	1	Laporan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Output Kegiatan	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2	Laporan	
Output Kegiatan	5319.002	Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah	34 Provinsi		2.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah I yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	13	Provinsi	
	02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah II yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	11	Provinsi	
	03	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	10	Provinsi	
Output Kegiatan	5319.003	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3 DOKUMEN		4.250.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Dokumen	
	02	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Dokumen	
	03	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Dokumen	
Output Kegiatan	5319.004	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 PAKET PEMBIAYAAN		1.300.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Paket Pembiayaan	
Output Kegiatan	5319.005	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3 LAPORAN		1.650.000.000
Output Kegiatan	5319.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Output Program	04	OUTPUT INTERNAL UNIT ESELON I			
Indikator Output Program	01	Jumlah Layanan Internal	1	Layanan	
Kegiatan	5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan			77.581.453.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi			
	02	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
	03	Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian			
	04	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
	05	Jumlah Laporan Keuangan			
	06	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang - undangan			
	07	Jumlah Laporan Pertimbangan/ Opini Hukum dan Pendampingan Hukum			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Kinerja Kegiatan	08	Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan			
	09	Jumlah Dokumen Anggaran Bidang Pembiayaan Perumahan			
	10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Setditjen			
	11	Jumlah Renovasi Gedung dan Bangunan			
	12	Jumlah layanan perkantoran			
Output Kegiatan	5315.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan		23.860.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	3	Laporan	
	02	Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian	3	Laporan	
	03	Jumlah Laporan Keuangan	5	Laporan	
	04	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan	5	Laporan	
	05	Jumlah Laporan Pertimbangan Opini Hukum dan Pendampingan Hukum	4	Laporan	
	06	Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan	5	Laporan	
	07	Jumlah Dokumen Anggaran Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	
	09	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3	Laporan	
Output Kegiatan	5315.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		4.450.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	124	Unit	
	02	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	153	Unit	
	03	Jumlah Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1	Layanan	
Output Kegiatan	5315.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		49.271.453.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah layanan perkantoran	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			20.520.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah I			
	02	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah II			
	03	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah III			
	04	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah IV			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Arvi Argyantoro, MA
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Bendahara Pengeluaran	: Mochamad Resya Choriawan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		

Indikator Kinerja Kegiatan	05	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	06	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan			
	07	Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5320.001	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	14 Laporan		11.490.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah I	3	Laporan	
	02	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah II	3	Laporan	
	03	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah III	3	Laporan	
	04	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Wilayah IV	3	Laporan	
	05	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2	Laporan	
Output Kegiatan	5320.002	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	4 Dokumen		2.580.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	4	Dokumen	
Output Kegiatan	5320.003	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	3 DOKUMEN		1.950.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1	Dokumen	
	02	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	1	Dokumen	
	03	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	1	Dokumen	
Output Kegiatan	5320.004	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	1 PAKET PEMBIAYAAN		1.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1	Paket Pembiayaan	
Output Kegiatan	5320.005	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	2 LAPORAN		1.600.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	2	Laporan	
Output Kegiatan	5320.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:2395-2505-3477-6025

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi	: (08)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker	: (400812)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

								Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	219.260.539.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	182.960.453.000			(2) RPLN	US$	2.420.006	Rp.	36.300.086.000
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	36.300.086.000			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	INTERNATIONALBANKFORRE	USD	1.000,00					
		8717-ID	USD	1.000,00					
		1HG72SWA	IDR	15.000.000,00	3	36.300.086			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:2395-2505-3477-6025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400812	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**26.536.988**	**188.273.551**	**4.450.000**	**-**	**-**	**219.260.539**		
033.08.12	**Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**	**26.536.988**	**188.273.551**	**4.450.000**	**-**	**-**	**219.260.539**		
5315	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**	**26.536.988**	**46.594.465**	**4.450.000**	**-**	**-**	**77.581.453**		
5315.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	23.860.000	-	-	-	23.860.000	01 . 54	
01	RM	-	23.860.000	-	-	-	23.860.000	139	
5315.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	4.450.000	-	-	4.450.000	01 . 54	
01	RM	-	-	4.450.000	-	-	4.450.000	139	
5315.994	Layanan Perkantoran	26.536.988	22.734.465	-	-	-	49.271.453	01 . 54	
01	RM	26.536.988	22.734.465	-	-	-	49.271.453	139	
5316	**Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan**	**-**	**29.140.000**	**-**	**-**	**-**	**29.140.000**		
5316.001	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan [PN]	-	20.228.062	-	-	-	20.228.062	01 . 54	
01	RM	-	17.340.000	-	-	-	17.340.000	139	
02	PLN	-	2.888.062	-	-	-	2.888.062	140	RK 1HG72SWA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:2395-2505-3477-6025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5316.002	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan [PN]	-	5.711.938	-	-	-	5.711.938	01 . 54	
01	RM	-	3.600.000	-	-	-	3.600.000	139	
02	PLN	-	2.111.938	-	-	-	2.111.938	140	RK 1HG72SWA
5316.003	Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 54	
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	139	
5316.004	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	139	
5316.005	Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	300.000	-	-	-	300.000	01 . 54	
01	RM	-	300.000	-	-	-	300.000	139	
5316.006	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	300.000	-	-	-	300.000	01 . 54	
01	RM	-	300.000	-	-	-	300.000	139	
5316.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:2395-2505-3477-6025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5317	**Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan**	**-**	**59.394.086**	**-**	**-**	**-**	**59.394.086**		
5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	-	6.800.000	-	-	-	6.800.000	01 . 00	
01	RM	-	6.800.000	-	-	-	6.800.000	139	
5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan [PN]	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	01 . 54	
01	RM	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	139	
5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan [PN]	-	46.500.086	-	-	-	46.500.086	01 . 54	
01	RM	-	15.200.000	-	-	-	15.200.000	139	
02	PLN	-	31.300.086	-	-	-	31.300.086	140	RK 1HG72SWA
5317.004	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	-	434.000	-	-	-	434.000	01 . 00	
01	RM	-	434.000	-	-	-	434.000	139	
5317.005	Pelaksanaan Investasi Perumahan	-	420.000	-	-	-	420.000	01 . 00	
01	RM	-	420.000	-	-	-	420.000	139	
5317.006	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 00	
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:2395-2505-3477-6025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5317.007	Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	840.000	-	-	-	840.000	01 . 00	
01	RM	-	840.000	-	-	-	840.000	139	
5317.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
5318	**Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan**	**-**	**18.625.000**	**-**	**-**	**-**	**18.625.000**		
5318.001	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya [PN]	-	5.200.000	-	-	-	5.200.000	01 . 54	
01	RM	-	5.200.000	-	-	-	5.200.000	139	
5318.002	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder [PN]	-	1.875.000	-	-	-	1.875.000	01 . 54	
01	RM	-	1.875.000	-	-	-	1.875.000	139	
5318.003	Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	-	5.850.000	-	-	-	5.850.000	01 . 54	
01	RM	-	5.850.000	-	-	-	5.850.000	139	
5318.004	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	01 . 54	
01	RM	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	139	
5318.005	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:2395-2505-3477-6025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	139	
5318.006	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	-	800.000	-	-	-	800.000	01 . 54	
01	RM	-	800.000	-	-	-	800.000	139	
5318.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
5319	**Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**-**	**14.000.000**	**-**	**-**	**-**	**14.000.000**		
5319.001	Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan	-	3.600.000	-	-	-	3.600.000	01 . 54	
01	RM	-	3.600.000	-	-	-	3.600.000	139	
5319.002	Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	01 . 54	
01	RM	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	139	
5319.003	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	-	4.250.000	-	-	-	4.250.000	01 . 54	
01	RM	-	4.250.000	-	-	-	4.250.000	139	
5319.004	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	01 . 54	
01	RM	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:2395-2505-3477-6025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5319.005	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	-	1.650.000	-	-	-	1.650.000	01 . 54	
01	RM	-	1.650.000	-	-	-	1.650.000	139	
5319.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
5320	**Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan**	**-**	**20.520.000**	**-**	**-**	**-**	**20.520.000**		
5320.001	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	11.490.000	-	-	-	11.490.000	01 . 54	
01	RM	-	11.490.000	-	-	-	11.490.000	139	
5320.002	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	2.580.000	-	-	-	2.580.000	01 . 54	
01	RM	-	2.580.000	-	-	-	2.580.000	139	
5320.003	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	-	1.950.000	-	-	-	1.950.000	01 . 54	
01	RM	-	1.950.000	-	-	-	1.950.000	139	
5320.004	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	01 . 54	
01	RM	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	139	
5320.005	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

DS:2395-2505-3477-6025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000	139	
5320.994	Layanan Perkantoran	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
	JUMLAH	**26.536.988**	**188.273.551**	**4.450.000**	**-**	**-**	**219.260.539**		

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**400812**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.995.179	6.390.301	6.088.355	11.507.265	12.871.140	9.565.880	20.314.117	13.721.541	34.201.680	34.201.680	34.201.680	34.201.721	219.260.539
		51 BELANJA PEGAWAI	1.363.992	1.657.904	1.617.259	2.040.933	3.545.110	3.631.585	2.052.366	1.934.010	2.173.456	2.173.456	2.173.456	2.173.461	26.536.988
		52 BELANJA BARANG	631.187	4.465.783	4.412.236	9.466.332	9.317.062	5.934.295	17.429.356	11.082.333	31.383.734	31.383.734	31.383.734	31.383.765	188.273.551
		53 BELANJA MODAL	0	266.614	58.860	0	8.968	0	832.395	705.198	644.490	644.490	644.490	644.495	4.450.000
	033.08.12.5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	1.936.139	4.868.082	4.605.825	7.849.965	7.241.012	5.643.771	7.789.213	5.708.631	7.984.700	7.984.700	7.984.700	7.984.715	77.581.453
		51 BELANJA PEGAWAI	1.363.992	1.657.904	1.617.259	2.040.933	3.545.110	3.631.585	2.052.366	1.934.010	2.173.456	2.173.456	2.173.456	2.173.461	26.536.988
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	572.147	2.943.564	2.929.706	5.809.032	3.686.934	2.012.186	4.904.452	3.069.423	5.166.754	5.166.754	5.166.754	5.166.759	46.594.465
		53 BELANJA MODAL	0	266.614	58.860	0	8.968	0	832.395	705.198	644.490	644.490	644.490	644.495	4.450.000
	033.08.12.5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	4.755	292.511	344.644	640.574	1.268.543	933.285	2.268.285	2.149.641	5.309.439	5.309.439	5.309.439	5.309.445	29.140.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.755	292.511	344.644	640.574	1.268.543	933.285	2.268.285	2.149.641	5.309.439	5.309.439	5.309.439	5.309.445	29.140.000
	033.08.12.5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	21.382	553.899	431.032	790.699	1.128.422	817.224	5.719.911	1.643.599	12.071.978	12.071.978	12.071.978	12.071.984	59.394.086
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	21.382	553.899	431.032	790.699	1.128.422	817.224	5.719.911	1.643.599	12.071.978	12.071.978	12.071.978	12.071.984	59.394.086
	033.08.12.5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	0	45.683	365.116	663.401	1.959.417	689.602	1.668.521	1.390.940	2.960.579	2.960.579	2.960.579	2.960.583	18.625.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	45.683	365.116	663.401	1.959.417	689.602	1.668.521	1.390.940	2.960.579	2.960.579	2.960.579	2.960.583	18.625.000
	033.08.12.5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	32.903	434.169	147.198	621.335	159.943	431.237	679.835	911.779	2.645.399	2.645.399	2.645.399	2.645.404	14.000.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	32.903	434.169	147.198	621.335	159.943	431.237	679.835	911.779	2.645.399	2.645.399	2.645.399	2.645.404	14.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	033.08.12.5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	0	195.957	194.540	941.291	1.113.803	1.050.761	2.188.352	1.916.951	3.229.585	3.229.585	3.229.585	3.229.590	20.520.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	195.957	194.540	941.291	1.113.803	1.050.761	2.188.352	1.916.951	3.229.585	3.229.585	3.229.585	3.229.590	20.520.000

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IV A. B L O K I R

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [08] DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [400812] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IV B. C A T A T A N

DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [08] DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [400812] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
400812	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**				
033.08.12	**Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**				
5315	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**				
5315.951	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	Rp.	560.000		
536111	Belanja Modal Lainnya				
	* Dalam rangka pembangunan/renovasi gedung 672 M	Rp.	560.000		

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

LAMPIRAN 5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT BINA SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rifaid M Nur**
Jabatan : Direktur Bina Sistem Pembiayaan Peruamahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Khalawi AH**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KHALAWI AH	**RIFAID M NUR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DIREKTORAT BINA SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan				
1	Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan	1)	Jumlah Materi Teknis/Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2 Dokumen
		2)	Jumlah Materi Teknis/ Dokumen Pedoman Pedoman Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2 Dokumen
		3)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah I	1 Laporan
		4)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	1 Laporan
		5)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	1 Laporan
		6)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan
2	Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah	1)	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah I yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	10 LKB/LKBB
		2)	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah II yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	10 LKB/LKBB
		3)	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	6 LKB/LKBB
3	Layanan perkantoran	1)	Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan Layanan

Kegiatan

1. Terselenggaranya pembinaan sistem pembiayaan perumahan

Anggaran

Rp 35.379.000.000,00

Jakarta, Januari 2019

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan

KHALAWI AH

Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan

RIFAID M NUR

LAMPIRAN 5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Februari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
EKO D. HERIPOERWANTO	**RENI AHIANTINI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan			
1	Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan	1) Jumlah Materi Teknis/Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2 Dokumen
		2) Jumlah Materi Teknis/ Dokumen Pedoman Pedoman Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2 Dokumen
		3) Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah I	1 Laporan
		4) Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	1 Laporan
		5) Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	1 Laporan
		6) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan
2	Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah	1) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah I yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	13 Provinsi
		2) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah II yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	11 Provinsi
		3) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	10 Provinsi
3	Layanan perkantoran	1) Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan Layanan

Kegiatan

1. Terselenggaranya Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan

Anggaran
Rp 35.379.000.000,00

Jakarta, 12 Februari 2019

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

EKO D. HERIPOERWANTO

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan

RENI AHIANTINI

LAMPIRAN 6

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
EKO D. HERIPOERWANTO	**RENI AHIANTINI**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PEMBINAAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
1.	Terselenggaranya Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	1) Jumlah Materi Teknis/Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2 Dokumen
		2) Jumlah Materi Teknis/Dokumen Pedoman Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	2 Dokumen
		3) Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah I	1 Laporan
		4) Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah II	1 Laporan
		5) Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan di Wilayah III	1 Laporan
		6) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan
		7) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah I yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	13 Provinsi
		8) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah II yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	11 Provinsi
		9) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Wilayah III yang Memperoleh Pembinaan dan Bantuan Teknis	10 Provinsi
		10) Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Dokumen
		11) Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Dokumen
		12) Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Dokumen
		13) Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Paket Permbiayaan
		14) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3 Laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		15) Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan

Kegiatan
1. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan

Anggaran
Rp 14.000.000.000,00

Jakarta, November 2019

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

EKO D. HERIPOERWANTO

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Jalan dan Jembatan

RENI AHIANTINI

LAMPIRAN 7

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

Nomor : RU 06-Dp/161 Jakarta, 7 Mei 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pemanfaatan Alokasi Dana Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2019**

Kepada Yth.

1. **Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan**
   Cq. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
2. **Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas**
   Cq. Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman

di-
Tempat

Sehubungan dengan telah dilakukannya restrukturisasi organisasi pada Tahun 2019 dari semula Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi baru. Selain melaksanakan tugas dan fungsi baru tersebut, Tahun 2019 juga digunakan untuk menyelesaikan target Renstra *Ex*-Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Untuk pendanaan pelaksanaan output-output baru akan dipenuhi dari realokasi anggaran Dekonsentrasi dan Dukungan Pelaksanaan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri PUPR, agar Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan tidak dilanjutkan dan bukan merupakan kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Untuk memenuhi output Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan dilaksanakan melalui kegiatan eksisting (Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah I, II, dan III) di luar kegiatan Dekonsentrasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Eko D. Heripoerwanto
NIP. 19610712 198912 1 001

Tembusan Yth:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
SATUAN KERJA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Lantai 3 Wing 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon: (021) 7264375